

2022



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2022. Dokumen ini memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui misi Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 1 ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”*** dalam rangka mewujudkan Jombang yang ***Ber karakter dan Berdaya Saing***.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jombang, 3 Januari 2023

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**
IDA KHUMAIDA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199302 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
D. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	5
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	8
H. Mandat dan Peran Strategis	10
I. Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	10
J. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis	19
A.1. Visi dan Misi	19
A.2. Tujuan dan Sasaran	20
A.3. Rencana Kerja Tahunan	22
B. Rencana Kerja	25
C. Perjanjian Kinerja	33
D. Pengukuran Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	57
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini .	58
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun Terakhir.....	114
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	119
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Nasional/Internasional	120
A.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja.....	123
B. Realisasi Anggaran	125
B.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran..	125
B.2 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.....	132
C. Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah	136

D. Upaya Perbaikan Kinerja	137
BAB IV PENUTUP	141
Lampiran – Lampiran	
1). Perjanjian Kinerja	
2). Sasaran Kinerja Pegawai	
3). Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	
4) Pengukuran Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Penyusunan LKJiP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJiP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mulai berdiri awal tahun 2017 yang merupakan gabungan dari beberapa Satuan Kerja yang membidangi komunikasi, informasi, telematika, kehumasan, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

D.1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

D.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang

hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam **Dinas Komunikasi dan Informatika** yang akan dihadapi pada rentang waktu 2018-2023 antara lain :

- Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkan adanya isu Tuntutan Reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial ekonomi
- Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
- Perlunya penyesuaian kelembagaan yang sesuai dengan RPJMD.
- Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
- Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif.

Dalam menindaklanjuti, memperbaiki dan mereleasikan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan progam dan kegiatan dalam lima tahun ke depan meliputi :

- Memberikan layanan publik melalui antar instansi dengan sistem dan aplikasi. Sistem dibuat oleh PD terkait, Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan;
- Memberikan informasi publik terkait kegiatan pembangunan melalui radio komunitas, website maupun pertunjukan;
- Mengamankan pengamanan sistem jaringan;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana koneksi jaringan mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten Jombang;
- Menampilkan data kinerja PD di Kabupaten Jombang melalui *command center*;
- Memperluas jangkauan radio SJFM untuk menyiarkan kegiatan pembangunan Lingkup Kabupaten Jombang.

F. CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dalam waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jombang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang yaitu terkait dengan pencapaian misi 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional.

Tujuan dari RPJMD dari misi 1 ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas dengan Indikator tujuan Indeks Good Governance. Sasaran RPJMD dari misi 1 ini adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kapabilitas layanan SPBE dan Meningkatkannya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi. Indikator Sasaran RPJMD yaitu Indeks Kualitas Layanan Publik, Indeks SPBE dan Indeks RB.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang adalah : (1) Meningkatnya kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika; (2) Meningkatnya Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE; (3) Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Adapun sasaran strategis meliputi : (1) Meningkatkan kepuasan masyarakat; (2) Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE; (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2018-2023	
Visi Jombang Berkarakter dan Berdayasaing	
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional	
Tujuan RPJMD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	Tujuan OPD (1) Meningkatkan kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika; (2) Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE; (3) Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.
Sasaran : (1) Meningkatkan kualitas Layanan Publik (2) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Sasaran OPD : (1) Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika ; (2) Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE; (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah.

G. PETA PROSES BISNIS

Dinas Kominfo telah menetapkan proses bisnis supata tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses Bisnis Dinas Kominfo dapat digambarkan sebagaimana terlampir

H. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kemajuan teknologi Informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, yaitu suatu teknologi serbaguna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis dan berpolitik-bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang.

Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuannya yang semakin meningkat drastis justru diikuti dengan harganya yang semakin turun drastis juga. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Teknologi Informasi yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan Cahaya. Melalui *internetworking* informasi dapat disebarkan secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang akan dan telah dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi.

Teknologi Informasi telah membawa dunia menuju era informasi, dimana informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi massa menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara.

Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkat teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi massa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Secara terstruktur, lingkungan strategik dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategik, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari atas dua faktor strategik, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Identifikasi terhadap lingkungan strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menghasilkan faktor-faktor strategik sebagai berikut :

H.1. FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan :

1. Mempunyai perencanaan dan mekanisme program kerja serta jadwal kegiatan yang jelas;
2. Sebagai mediator komunikasi / informasi pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
3. Mempunyai sarana dan prasarana komunikasi, informasi, melalui *website*, media cetak dan media elektronik;
4. Jumlah Pegawai yang cukup banyak.

b. Kelemahan

1. Kualitas pegawai kurang kreatif dan rendahnya tenaga terdidik bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik;
2. Kurangnya jiwa profesionalitas dalam pembagian kerja;
3. Sistem koordinasi belum maksimal;
4. Jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai;
5. Kurangnya pemahaman tugas yang diemban;

H.2. FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang

1. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 25 tahun 2020;
2. Peran aktif dan komunikasi masyarakat;
3. Adanya kesempatan peningkatan kualitas / sumber daya manusia pegawai melalui jenjang yang lebih tinggi (S1, S2), kursus ketrampilan bidang komunikasi dan informasi.
4. Adanya kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. Adanya sarana prasarana yang cukup untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Tantangan / Ancaman.

1. Tuntutan masyarakat tentang keterbukaan semakin meningkat dan persaingan bidang komunikasi semakin kompetitif;
2. Seringnya pergantian / penambahan peraturan dalam pelaksanaan;
3. Pelayanan informasi terpadu yang masih kurang optimal;

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dalam menjalankan peran strategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Perencana.

3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

- a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Hubungan Masyarakat.

4. Bidang Aplikasi Informatika

- a. Sub Koordinator Sub Substansi Infrastruktur TIK;
- b. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government; dan
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Tata Kelola e-Government.

5. Bidang Statistik dan Persandian

- a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan dan Evaluasi Data;
- b. Sub Koordinator Sub Substansi Statistik Sektoral;
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------|
| - Pejabat eselon II | : 1 orang |
| - Pejabat eselon III | : 4 orang |
| - Pejabat eselon IV | : 10 orang |
| - Staf PNS | : 16 orang |
| - Staf Non PNS | : 12 orang |

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

a. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga;

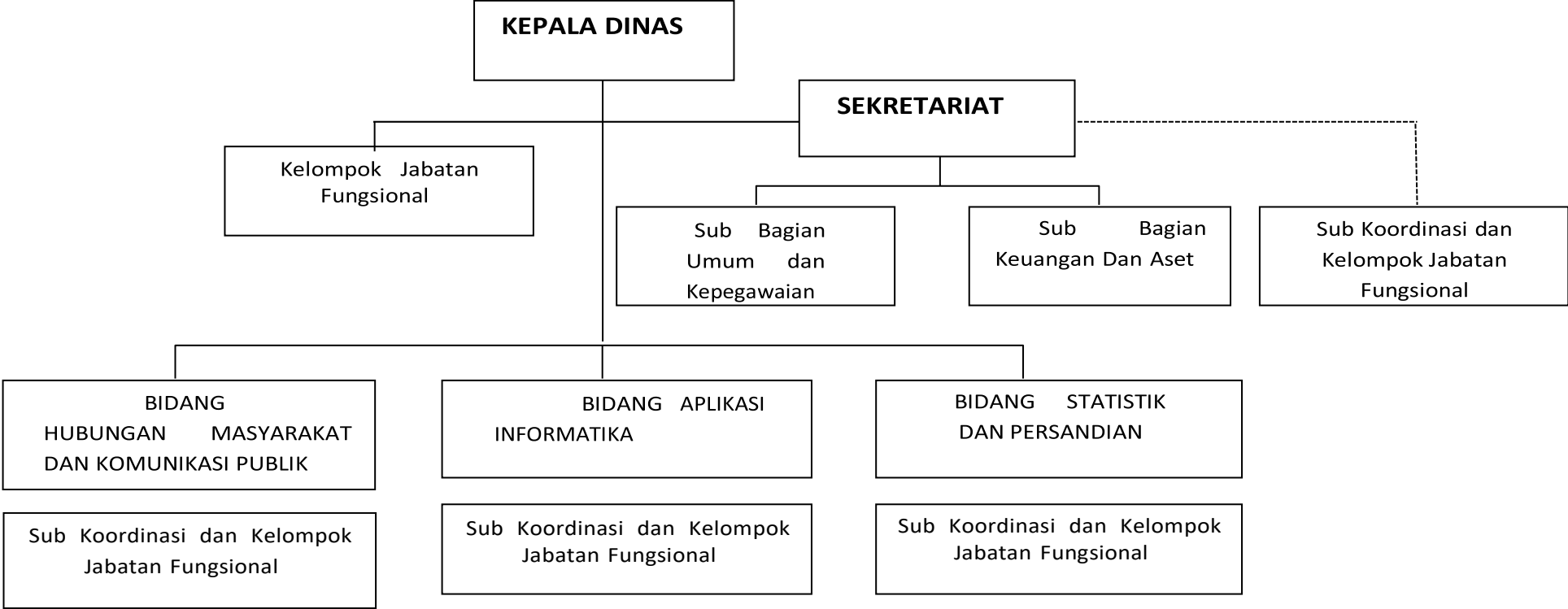
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 8. Pengelolaan kearsipan;
 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:
1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 5. Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;

6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;
 7. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;
 8. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
 9. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
 10. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu satuan kerja yang mempunyai peran sangat strategis, yaitu sebagai penyebar informasi pembangunan Kabupaten Jombang kepada masyarakat, juga berperan sebagai penyerap informasi timbal balik dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, penyelenggara bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Selain sumberdaya manusia juga memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

a. Konektivitas Jaringan Intranet

53 PD menggunakan koneksi jaringan intra metro perkotaan, dengan jumlah koneksi 70 titik dan 21 kecamatan meenggunakan jaringan intra kecamatan dengan penyediaan bandwith 1000 Mbps;

b. Aplikasi dan Pusat Data

1. Penyediaan ruang server yang sesuai standar Permenkominfo;
2. Layanan email jombangkab.go.id seluruh OPD;
3. Sarana Layanan Kegawatdaruratan Call Center 112 selama 24 jam terkait penanganan Kecelakaan, kebakaran, kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun kondisi gawat darurat lainnya;
4. Media publikasi dengan alamat website resmi www.jombangkab.go.id sebagai portal resmi Kabupaten Jombang.

c. Komunikasi dan Informasi Publik

1. Radio Suara Jombang 94,1 FM dengan radius hingga 25 km;
2. Sarana pengaduan masyarakat melalui Lapor SP4N;
3. Layanan Informasi Publik melalui PPID;
4. Media social terkait informasi berita Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Instagram di @pembangkab dan Youtube Channel : JombangkabTV;
5. Videotron sebagai layanan diseminasi informasi kepada masyarakat yang terletak di Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Perempatan Tugu (Jl. KH. Wachid Hasyim) Kabupaten Jombang.

d. Persandian dan Statistik

1. Layanan satu data Jombang terdiri dari 3029 data, 31 urusan, 63 produsen yang dipublikasikan melalui portal sambang.jombangkab.go.id;
2. Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh PD di aplikasi persuratan srikandi.arsip.go.id;

J. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor : X700/310/415.15/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten jombang Tahun 2021 s/d Semester I Tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten jombang Tahun 2022 adalah 80,01 dengan kategory A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Kominfo sebagaimana rincian berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,29
b	Pengukuran Kinerja	25%	27,50
c	Pelaporan Kinerja	15%	7,66
d	Evaluasi Kinerja	10%	19,66
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	80,01

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

- Melakukan penyesuaian kembali atas ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dan target kinerja pada tujuan, sasaran strategis dan program kegiatan pada dokumen perencanaan tahun berikutnya, sehingga didapar keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya pada indikator tujuan “Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator) dengan target keluaran “18 indikator terkelola” sehingga dapat diketahui kondisi kinerja yang akan dicapai pada setiap perencanaan;
- Dalam menetapkan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) agar dibuat dengan perhitungan yang logis dan realistis berdasarkan basis data yang memadai serta dapat menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam setiap indikator;
- Melakukan revisi atas hasil monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra yaitu tidak hanya monitoring pada program, kegiatan dan subkegiatan, melainkan juga pada capaian tujuan dan sasaran strategis serta memberikan Analisa beserta hambatan, upaya dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja
- Target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja selain dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan (reward) agar juga dapat dimanfaatkan untuk :
 - Memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja:
 - Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan

2) Pengukuran Kinerja

- Hasil pengukuran kinerja yang telah dilengkapi dengan penjelasan atas capaian kinerja, upaya dan/atau hambatan, data kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan bukti tindak lanjut sebagai upaya perbaikan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai kinerja (khususnya strategi dan kebijakan pada tujuan strategis “Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE”)
- Dalam pemberian reward and punishment atas penilaian kinerja pegawai agar dibuatkan standar/tingkatan yang jelas atas :
 - Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai);
 - Pejabat/Pegawai dengan capaian diatas standar

3) Pelaporan Kinerja

- Pada dokumen laporan kinerja agar menambahkan informasi tentang efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai;
- Upaya dan/atau hambatan atas capaian kinerja yang telah dijelaskan dalam dokumen laporan kinerja agar tidak bersifat general/umum, seharusnya dapat dijelaskan secara spesifik pada setiap sasaran strategis dan sasaran program
- Informasi dalam laporan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja

4) Evaluasi Kinerja

- Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP untuk anggota tim
- Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatanmya berlandaskan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang sesuai dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

A.1 VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Adapun visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Jombang yang dirumuskan dengan memperhatikan Visi Bupati Jombang yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yaitu : ***“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”***

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”**.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan OPD sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika;**
- 2. Meningkatnya Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE;**
- 3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

Dari tujuan diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika;**
- 2. Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE;**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

Dari sasaran tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 5 Program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

4. Program Penyelenggaran Statistik Sektor

Kegiatan Penyelenggaran Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
- Membangun Metadata Statistik Sektor

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten

A.3. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen perencanaan kinerja terangkum dalam Rencana kinerja tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

Program – program yang telah ditetapkan pelaksanaannya dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika terangkum sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR	Target	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM		
						URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Layanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika	7,69	Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	1. 84 (baik) 2. 62 (sedang)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3.1%
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan	1. 3,52 2. 100%
						Program Penyelenggaraan Persandian	Persentase Informasi yang dilakukan pengamanan	100%
Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator	Program Aplikasi Informatika	1.Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Indeks SPBE terkait layanan Komunikasi dan Informatika	1. Level 2 2. 18 indikator terkelola
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	73,39	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	79 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

B. RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022 sebagai berikut :
Anggaran setelah perubahan : Rp. 15.731.283.831

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	7.821.236.581	DAU
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 %	3.652.100	DAU
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	1.977.100	DAU
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	1.675.100	DAU
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100 %	5.125.887.318	DAU
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	14 kali	4.913.414.318	DAU
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	11 kegiatan	212.196.000	DAU
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	1 dokumen	280.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	799.652.000	DAU
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	450 orang	799.652.000	DAU
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	318.618.425	DAU
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	13.827.125	DAU
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	77.715.500	DAU
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	114.581.300	DAU
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	4 jenis	44.143.500	DAU
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	1 jenis		
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 media	9.916.000	DAU
2.16.01.2.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 kali	58.435.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	602.851.100	DAU
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	3 lokasi	289.806.000	DAU
2.16.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis	313.045.100	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	970.575.638	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	83.160.000	DAU
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	17 unit	13.000.000	DAU
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	17 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 lokasi	293.261.638	DAU
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	3 lokasi	581.154.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	3.496.508.850	DAU
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	1.970.888.100	DAU
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	64 subdomain	279.250.000	DAU
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	68 titik	1.691.638.100	DAU
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	25%	1.525.620.750	DAU
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	2 dokumen	177.492.000	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	20%	457.333.750	DAU
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	2 aplikasi	890.795.000	DAU
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	62 sedang	3.869.703.500	DAU
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	84 (baik)		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,1 %	3.869.703.500	DAU
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	5 media	891.270.400	DAU
		Jumlah program siaran radio per minggu	7 program		
	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100%	61.868.600	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
		Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100%		
		Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	5 desa		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	45 mitra kerjasama	2.916.564.500	DAU
		Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	13.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	340.727.500	DAU
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	340.727.500	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	9 kali	170.221.000	DAU
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	28 data sektoral	170.506.500	DAU

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Capaian Kinerja 2022	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75%	203.107.400	DAU
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75%	203.107.400	DAU
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	3 sistem elektronik	203.107.400	DAU

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan Tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja yang ditandatangani oleh Bupati Jombang. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika setelah adanya perubahan anggaran Tahun 2022 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator kriteria terkelola
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	79 (BB)

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Persentase rata-rata Kinerja Capaian Aparatur	Jumlah jasa pelayanan administrasi perkantoran _____x100% Jumlah capaian kinerja pelayanan administrasi	Sekretariat dan Kepala Dinas Kominfo

Sasaran Strategis		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
					perkantoran yang telah tercapai	
Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Kepala Dinas Kominfo dan Bidang Humas dan Komunikasi Publik
				Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data sektoral yang ada _____ x 100% Jumlah data sektoral yang dipublikasikan	Bidang Persandian dan Statistik
				Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	Jumlah sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi _____ x 100	

Sasaran Strategis		Progam	Sasaran Progam	Indikator Progam	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Bidang APTIKA
				Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Nilai Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	

D. PENGUKURAN KINERJA

Pelaksanaan akuntabilitas harus dapat dinilai dengan tolok ukur pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Pengukuran kinerja membutuhkan artikulasi yang jelas dari misi organisasi dan dari tujuan, sasaran yang terukur.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu penjabaran atas metode pengukuran. Terhadap beberapa IKU yang dicapai dengan ketersediaan dokumen akan diberikan penjelasan sederhana terhadap bentuk dokumen dan proses penyusunan dokumen tersebut. Data-data pendukung akan dilampirkan bersama dengan laporan ini.

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika**

- **Indikator 1 :** Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada pada Dinas Kominfo dalam pelayanan terhadap kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan Penambahan Titik Jaringan;
- (2) Pelayanan Publikasi Informasi di Portal;
- (3) Pelayanan Penanganan Aduan Gangguan Layanan IT;
- (4) Pelayanan Penitipan Server (Co-Location);
- (5) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 menggunakan aplikasi SUKMASANTRI yang telah terintegrasi dengan Sukma e-Jatim dari Provinsi Jawa Timur. Periode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dimulai sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

- **Indikator 2 :** Indeks Pelayanan Publik (IPP) dibidang komunikasi dan informatika dengan target 3,52. Untuk menilai indikator ini diukur dengan kinerja standar **pelayanan publik** di lingkungan Dinas Kominfo terhadap layanan : (1) Pelayanan Penambahan Titik Jaringan; (2) Pelayanan Publikasi Informasi di Portal; (3) Pelayanan Penanganan Aduan Gangguan Layanan IT; (4) Pelayanan Penitipan Server (Co-Location); (5) Pelayanan Permohonan

Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang. Dalam evaluasi IPP Terdapat beberapa aspek dan indikator yang dilakukan monitoring dan evaluasi meliputi :

A. Penerapan Standar Pelayanan

- Aspek Kebijakan Pelayanan : 13 indikator
- Aspek Profesionalisme SDM : 7 Indikator
- Aspek Sarana dan Prasarana : 7 Indikator
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : 5 Indikator
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : 4 Indikator

B. Indeks Pelayanan Publik

- Aspek Kebijakan Pelayanan : 13 Indikator
- Aspek Profesionalisme SDM : 7 Indikator
- Aspek Sarana dan Prasarana : 7 Indikator
- Aspek Sistem informasi : 5 Indikator
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : 4 Indikator
- Aspek Inovasi : 1 Indikator

• **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE**

Indikator 1 : Indeks SPBE , dengan target 18 indikator terkelola. Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 18 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

- 1) Kebijakan internal Arsitektur SPBE telah ditetapkan
- 2) Kebijakan internal Peta Rencana SPBE telah ditetapkan
- 3) Kebijakan internal Manajemen Data telah ditetapkan

- 4) Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi telah ditetapkan
 - 5) Kebijakan internal Layanan Pusat Data telah ditetapkan
 - 6) Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra telah ditetapkan
 - 7) Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung telah ditetapkan
 - 8) Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan
 - 9) Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan
 - 10) Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan
 - 11) Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pengembangan aplikasi
 - 12) Layanan Pusat Data telah digunakan pada sebagian perangkat daerah
 - 13) Layanan Jaringan Intra telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah
 - 14) Penggunaan Sistem Penghubung telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah
 - 15) Manajemen Keamanan telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah
 - 16) Manajemen Data telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah
 - 17) Layanan Pengaduan telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi
 - 18) Layanan Data Terbuka telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi
- Adapun kriteria kematangan proses pada nilai tingkat kematangan SPBE tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 s.d. 1,99: Rintisan
- 2 s.d. 2,99: Terkelola
- 3 s.d. 3,99: Terdefinisi
- 4 s.d. 4,99: Terpadu dan Terukur
- 5: Optimum

- **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

- **Indikator 1** : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SAKIP) yang dilakukan penilaian oleh Pemkab Jombang kepada Dinas Kominfo.

- **Sasaran Program :**

- **Indikator 1 : Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur dengan target 100%.** Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari penilaian kinerja staf Dinas Kominfo terhadap pelayanan kinerja yang ditargetkan.
- **Indikator 2 :**

□ **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** dengan target 62 (sedang). Penyusunan (I-PIKP) merupakan kegiatan bersifat tahunan yang berfungsi untuk mengevaluasi dan melihat kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan I-PIKP bertujuan untuk mengetahui umpan balik berupa indeks kinerja dan kepuasan masyarakat atau pemangku kepentingan atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Dimensi dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan metode survei, interview dan pengumpulan data sebagai berikut :.

Tabel . Dimensi Penyusunan Dokumen I-PIKP

Dimensi Input		
No	Variabel	Indikator
1	Anggaran	1. Ketersediaan Total Anggaran Kegiatan IKP di tahun berjalan 2. Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Kegiatan IKP 3. Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan IKP 4. Ketersediaan Anggaran tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya
2	Bahan Informasi	5. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP 6. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (suratkabar dan majalah berita) 7. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV) 8. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru 9. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 10. Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan lembaga lain
3	Sarana dan Prasarana	11. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline
4	Media dan Saluran Komunikasi	12. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan 13. Ketersediaan media partner

Dimensi Proses		
No	Variabel	Indikator
5	Pengumpulan Data dan Informasi	14. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP 15. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik 16. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain
6	Perencanaan	17. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan 18. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan 19. Ketersediaan dokumen “Perencanaan Program/Kegiatan”, proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan
7	Pelaksanaan	20. Kegiatan diseminasi program prioritas daerah 21. Kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang 22. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka 23. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi 24. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi 25. Frekuensi kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik
8	Monitoring dan Evaluasi	26. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 27. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 28. Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”
Dimensi Output		
No	Variabel	Indikator
9	Agenda Publik	29. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah 30. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah 31. Persepsi terhadap program prioritas daerah yang dianggap penting
10	Kepuasan Publik Terhadap Pengelolaan IKP	32. Persepsi terhadap pelayanan informasi di Diskominfo Kabupaten Jombang

Dimensi Outcome		
No	Variabel	Indikator
11	Hak untuk Mengetahui	33. Penilaian terhadap kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui 34. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah
12	Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	35. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui 36. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah

□ **Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84 (baik).**

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada pada Dinas Kominfo dalam pelayanan terhadap kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Penambahan Titik Jaringan;
2. Pelayanan Publikasi Informasi di Portal;
3. Pelayanan Penanganan Aduan Gangguan Layanan IT;
4. Pelayanan Penitipan Server (Co-Location);
5. Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 menggunakan aplikasi SUKMASANTRI yang telah terintegrasi dengan Sukma e-Jatim dari Provinsi Jawa Timur. Periode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dimulai sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

• **Indikator 3 :**

□ **Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target Level 2.**

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dengan Perkembangan Pembangunan Kematangan TIK di Kabupaten Jombang. Perhitungan Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi penting untuk melihat kondisi dan mengevaluasi sejauh mana kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pengertian kematangan TIK adalah adanya tingkat kehandalan dalam penerapan mekanisme tata kelola TIK yang terdiri dari struktur peran dan proses/prosedur untuk

memastikan bahwa pelaksanaannya dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mengetahui tingkat kehandalan tata kelola TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, dibutuhkan kegiatan evaluasi melalui perhitungan IK-TIK.

Sistem perhitungan Indeks Kematangan TIK dilakukan dengan sistem pemetaan tujuan dan isu strategis dengan domain COBIT 2019, selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan data melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (i) kuesioner; (ii) wawancara; dan (iii) observasi. Pada pengumpulan data melalui kuesioner, dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (i) kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap output TIK berbasis model SKM; (ii) kuesioner untuk mengukur IK-TIK berbasis COBIT 2019. Sementara untuk wawancara dan observasi, hanya diperuntukkan pada pengukuran IK-TIK, karena kuesioner COBIT 2019 harus ditindaklanjuti dengan kegiatan audit dan observasi langsung terhadap masing-masing instansi. Kegiatan tersebut langsung dilakukan oleh Tenaga Ahli Komputer yang didampingi dengan surveyor. Variabel yang ditanyakan dalam kuisisioner pengukuran Indeks Kematangan TIK adalah sebagai berikut:

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
Aspek Input			
1	Kebijakan	1	Skala prioritas pengembangan TIK
		2	Peraturan pemerintah sebagai pedoman kebijakan TIK
		3	Proses evaluasi pengembangan egovernment
		4	Strategi kebijakan TIK
		5	Keselarasan kebijakan TIK dengan visi misi instansi
2	Kelembagaan	1	Ketersediaan dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan TIK
		2	Program pelatihan TIK
3	Infrastruktur	1	Strategi pemeliharaan infrastruktur TIK

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
		2	Proses penanggulangan bencana TIK
		3	Pengelolaan keamanan informasi
		4	Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
		5	Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
		6	Infrastruktur jaringan antar OPD
		7	Infrastruktur terkait akses internet terpusat
		8	Inventarisasi infrastruktur TIK
4	Aplikasi	1	Inventarisasi aplikasi TIK
		2	Situs resmi instansi /OPD
5	Perencanaan	1	Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
		2	Mekanisme penyusunan perencanaan
		3	Rencana induk TIK
		4	Anggaran penerapan TIK
Aspek Proses			
6	EDM01	1	Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7	EDM02	1	Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
8	EDM03	1	Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan TI
9	EDM04	1	Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat TI

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
10	EDM05	1	Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11	APO01	1	Mengintegrasikan proses pelaksanaan TI dengan orientasi instansi
12	APO02	1	Cara instansi mengidentifikasi potensi teknologi dan menciptakan pelayanan publik
13	APO03	1	Cara instansi memfasilitasi penciptaan TI yang optimal
14	APO04	1	Ketersediaan divisi TI pada struktur instansi
15	APO05	1	Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan penawaran investasi
		2	Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan layanan dan kapabilitas TI
16	APO06	1	Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
17	APO07	1	Kesesuaian proses rekrutmen personil TI dengan kebijakan dan prosedur instansi
18	APO08	1	Koordinasi dalam penerapan integrasi pengelolaan jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19	APO09	1	Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20	APO11 1	1	Cara instansi meningkatkan layanan kualitas TI

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
21	APO12 1.	1	Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22	APO13 1.	1	22 APO13 1. Kepemilikan keamanan TI yang memadai
23	BAI01	1	Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan TI dengan strategi instansi
		2	Sistem pelaporan kinerja TIK
24	BAI 03	1	Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
		2	Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan hardware
25	BAI04 1.	1	Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI
26	BAI05 1.	1	Penetapan rencana uji perubahan TI sudah sesuai dengan standar instansi
27	BAI06 1.	1	Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara mendadak dan pendokumentasiannya
28	BAI07 1.	1	Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai standar yang ada
29	BAI08	1	Perencanaan pengembangan SDM untuk solusi operasional
30	BAI09	1	Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
31	BAI10	1	Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang TI
32	DSS01	1	Implementasi prosedur operasi TI untuk mendukung kinerja instansi
33	DSS02	1	Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas sesuai dengan kekritisian bisnis dan perjanjian layanan
		2	Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI, penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian resolusi
34	DSS03	1	Pengelolaan permasalahan TI sesuai dengan standar
35	DSS04	1	Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan hardware pada instansi
36	DSS05	1	Dukungan layanan TI pada instansi
37	DSS06	1	Prosedur untuk back-up data sejalan dengan layanan dan dukungan bisnis

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan	
38	MEA01	1	Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola TI dengan tata kelola instansi secara keseluruhan
39	MEA02	1	Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan kinerja yang telah ditargetkan
40	MEA03	1	Identifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur dan metodologi TI
Aspek Output			
41	Output	1	Kompleksitas layanan dilihat dari informasi, interaksi, transaksi dan integrasi
		2	Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk warga dan pelaku usaha
42	Usage	1	Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi website pemerintah
		2	Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan publik secara online

- **Indeks SPBE , dengan target 18 indikator terkelola.** Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 18 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

- 1) Kebijakan internal Arsitektur SPBE telah ditetapkan;
- 2) Kebijakan internal Peta Rencana SPBE telah ditetapkan;
- 3) Kebijakan internal Manajemen Data telah ditetapkan;
- 4) Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi telah ditetapkan;
- 5) Kebijakan internal Layanan Pusat Data telah ditetapkan;
- 6) Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra telah ditetapkan;

- 7) Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung telah ditetapkan;
- 8) Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan;
- 9) Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan;
- 10) Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan;
- 11) Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pengembangan aplikasi;
- 12) Layanan Pusat Data telah digunakan pada sebagian perangkat daerah;
- 13) Layanan Jaringan Intra telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah;
- 14) Penggunaan Sistem Penghubung telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah;
- 15) Manajemen Keamanan telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah;
- 16) Manajemen Data telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah;
- 17) Layanan Pengaduan telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi;
- 18) Layanan Data Terbuka telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi;

Adapun kriteria kematangan proses pada nilai tingkat kematangan SPBE tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 s.d. 1,99: Rintisan
- 2 s.d. 2,99: Terkelola
- 3 s.d. 3,99: Terdefinisi
- 4 s.d. 4,99: Terpadu dan Terukur
- 5: Optimum

- **Indikator 4 : Persentase data sektoral yang dipublikasikan** dengan target 100%

Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur melalui pengumpulan, mengolah, menganalisa data dan statistik daerah berupa jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang sebanyak 3 dokumen yaitu buku infografis sektoral, Indeks Kematangan TIK dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) yang dipublikasikan 100%.

- **Indikator 5 : Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik** dengan target 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini pencapaian kinerja diukur dari Jumlah sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Jombang yang ditargetkan memiliki sistem keamanan berupa tanda tangan elektronik.

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90% - 110%	Baik (Berhasil)
3	>70 – 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50 – 70%	Kurang
5	0% - 50%	Sangat Kurang

Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Strategis merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi.

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan capaian kinerja organisasi yaitu 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Sasaran Program yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU tersebut ditabulasi seperti tabel berikut :

**Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84	86.48	102,95		
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52	2,35	66,76		
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18	Indikator terkelola	18	Indikator terkelola	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	79	BB	80.01	A	101,27
TOTAL CAPAIAN					92,75		

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	100 %	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	62 (sedang)	65,51 (baik)	105,66%
			Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84 baik	86,48 baik	102,95%
3	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	2 Level	3 Level	150%
			Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator kriteria terkelola	18 indikator kriteria terkelola	100%
4	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100 %	100 %	100%
			Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52 (baik)	2,35 (baik)	66,76%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75 %	100 %	100%
RATA-RATA						108%

Rata-rata capaian strategis = 92,75%

-----X 100% = Total Rata-Rata 100,37%

Rata-Rata Capaian Program = 108%

Berdasarkan pada penetapan Sasaran Strategis yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84

Hasil penilaian dari Survei Kepuasan masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik merupakan hasil dari penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan kominfo berupa kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan Penambahan Titik Jaringan;
- (2) Pelayanan Publikasi Informasi di Portal;
- (3) Pelayanan Penanganan Aduan Gangguan Layanan IT;
- (4) Pelayanan Penitipan Server (Co-Location);
- (5) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang.

Penilaian melalui aplikasi SUKMASANTRI realisasi dari IKM Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 86.48 tercapai dari target 84. Laporan Layanan IKM berdasarkan unsur sebagai berikut :

PELAYANAN PENAMBAHAN TITIK JARINGAN

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	78.95	Baik
2	Prosedur	80.26	Baik
3	Waktu	84.21	Baik
4	Biaya/Tarif	98.68	Sangat Baik

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	85.53	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	89.47	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	89.47	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	85.53	Baik
9	Penanganan Pengaduan	90.79	Sangat Baik
	IKM Perjenis Layanan	86.99	Baik

PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI DI PORTAL jombangkab.go.id

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	85.08	Baik
2	Prosedur	83.47	Baik
3	Waktu	82.26	Baik
4	Biaya/Tarif	94.76	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	85.48	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	87.9	Baik
7	Perilaku Pelaksana	84.68	Baik
8	Sarana dan Prasarana	83.87	Baik
9	Penanganan Pengaduan	85.08	Baik
	IKM Perjenis Layanan	85.84	Baik

PELAYANAN PENANGANAN ADUAN GANGGUAN LAYANAN IT (Berbasis web dan android)

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	88.82	Sangat Baik

2	Prosedur	85.53	Baik
3	Waktu	84.21	Baik
4	Biaya/Tarif	98.68	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	86.18	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	88.16	Baik
7	Perilaku Pelaksana	86.84	Baik
8	Sarana dan Prasarana	84.87	Baik
9	Penanganan Pengaduan	81.58	Baik
	IKM Perjenis Layanan	87.21	Baik

PELAYANAN PENITIPAN SERVER (Co-Location)

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	87.5	Baik
2	Prosedur	87.5	Baik
3	Waktu	84.38	Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	84.38	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	84.38	Baik
7	Perilaku Pelaksana	87.5	Baik
8	Sarana dan Prasarana	87.5	Baik
9	Penanganan Pengaduan	84.38	Baik
	IKM Perjenis Layanan	87.5	Baik

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN JOMBANG

Unsur	Nama unsur	Rata-rata unsur	Keterangan
1	Persyaratan	84.72	Baik
2	Prosedur	81.94	Baik
3	Waktu	84.72	Baik
4	Biaya/Tarif	95.83	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	83.33	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	77.78	Baik
7	Perilaku Pelaksana	86.11	Baik
8	Sarana dan Prasarana	84.72	Baik
9	Penanganan Pengaduan	84.72	Baik
	IKM Perjenis Layanan	84.88	Baik

- Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung capaian kinerja sasaran strategis 1 adalah :**
- Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator 1 : Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) target 62 dengan realisasi 63,57.

Berdasarkan analisis kinerja masing-masing dimensi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada BAB II, maka hasil pengukuran I-PIKP pada Diskominfo Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

Dimensi Input					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
1	Anggaran	1. Ketersediaan Total Anggaran Kegiatan IKP di tahun berjalan	6,25	0,33	2,06
		2. Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Kegiatan IKP	6,25	0,33	2,06
		3. Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan IKP	6,25	0,33	2,06
		4. Ketersediaan Anggaran tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya	6,25	0,33	2,06
2	Bahan Informasi	5. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP	5,00	0,67	3,35
		6. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (suratkabar dan majalah berita)	5,00	0,67	3,35
		7. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media eletronik konvensional (radio dan TV)	5,00	0,67	3,35
		8. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru	5,00	0,67	3,35
		9. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang	5,00	0,67	3,35
		10. Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan lembaga lain	5,00	0,67	3,35
3	Sarana dan Prasarana	11. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline	20,00	0,67	13,40
4	Media dan Saluran Komunikasi	12. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan	12,50	0,67	8,38
		13. Ketersediaan media partner	12,50	1,00	12,50
INDEKS DIMENSI INPUT			100,00		62,63

Dimensi Input					
Dimensi Proses					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
5	Pengumpulan Data dan Informasi	14. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP	9,00	0,33	2,97
		15. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik	8,00	0,33	2,64
		16. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain	8,00	0,67	5,36
6	Perencanaan	17. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	8,00	0,67	5,36
		18. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahun	8,00	0,33	2,64
		19. Ketersediaan dokumen “Perencanaan Program/Kegiatan”, proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan	9,00	1,00	9,00
7	Pelaksanaan	20. Kegiatan diseminasi program prioritas daerah	5,00	1,00	5,00
		21. Kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang	5,00	1,00	5,00
		22. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka	5,00	1,00	5,00
		23. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi	5,00	1,00	5,00
		24. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi	5,00	1,00	5,00
		25. Fekuensi kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik	5,00	1,00	5,00
8	Monitoring dan Evaluasi	26. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	6,00	0,67	4,02

Dimensi Input					
		27. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	6,00	0,67	4,02
		28. Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”	8,00	0,33	2,64
INDEKS DIMENSI PROSES			100,00		6865
Dimensi Output					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
9	Agenda Publik	29. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah	-	-	61,33
		30. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah	-	-	58,67
		31. Persepsi terhadap program prioritas daerah yang dianggap penting	-	-	62,67
10	Kepuasan Publik Terhadap Pengelolaan IKP	32. Persepsi terhadap pelayanan informasi di Diskominfo Kabupaten Jombang	-	-	60,00
INDEKS DIMENSI OUTPUT					60,67
Dimensi Outcome					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
11	Hak untuk Mengetahui	33. Penilaian terhadap kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui	-	-	65,33
		34. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah	-	-	62,67
12	Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	35. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui	-	-	62,67
		36. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah	-	-	58,67
VARIABEL DIMENSI OUTCOME					62,33

Penilaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) secara keseluruhan pada Diskominfo Kabupaten jombang tahun 2022 didasarkan pada perhitungan rata-rata dari total nilai I-PIKP pada masing-masing dimensi, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Berdasarkan penilaian I-PIKP pada kelima jenis dimensi tersebut, maka perhitungan I-PIKP secara keseluruhan di Diskominfo Kabupaten Jombang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. I-PIKP Dimensi Input : 62,63 (Sedang)
2. I-PIKP Dimensi Proses : 68,65 (Sedang)
3. I-PIKP Dimensi Output : 60,67 (Sedang)
4. I-PIKP Dimensi Outcome : 62,33 (Sedang)
5. **Rata-Rata (I-PIKP Keseluruhan Tahun 2022) : 63,57 (Sedang)**

Berdasarkan hasil nilai rata-rata di atas, maka **I-PIKP Diskominfo Kabupaten Jombang tahun 2022 sebesar 63,57 atau dalam kategori ‘Sedang’**. Jenis dimensi dengan nilai I-PIKP tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah: (i) pertama adalah dimensi proses; (ii) kedua adalah dimensi input; (iii) ketiga adalah dimensi outcome; dan (iv) keempat adalah dimensi output. Berdasarkan hasil tersebut, maka secara umum jenis dimensi yang perlu diprioritaskan penanganannya oleh Diskominfo Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah jenis dimensi output, baik dari jenis variabel agenda publik maupun kepuasan publik terhadap pengelolaan IKP.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator kegiatan adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan target Indikator 3,2%. Indikator pada penilaian kegiatan ini merupakan penilaian dari presentasi Jumlah Penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang dengan Jumlah peserta sosialisasi yang ada pada dinas Kominfo.

Rumus :

jumlah usia produktif penduduk di Kabupaten Jombang

_____x 100%

Jumlah sosialisasi penyebaran informasi publik yang ada di Dinas Kominfo

**DATA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1	Jumpa fans HUT Radio SJFM	Radio SJFM	125 peserta
2	Kominfo "Goes to School" Public Speaking	MAN 6 Murukan Mojoagung	75 peserta
3	Pembinaan Dan Pelatihan KIM Tema : Pelatihan dan pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi desa melalui Website dan Podcast	Ds.Kwaron Kec.Diwek	55 peserta
4	Rapat koordinasi PPID	Pemkap Jombang R.Suro	60 peserta

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
5	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional Tema : Serap aspirasi masyarakat pada sektor Pelayanan Publik maupun program Pemerintah Daerah di bidang Pertanian,peternakan,perikanan serta intrastukturdi wilayah Kec Peterongan	Ds.Tengaran Kec Peterongan	500 peserta
6	Sosialisasi Lapor SP4N Goes To Pesantren	Ds.Kwaron ,Kec Diwek	70 peserta
7	Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kepemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Ngoro dan Kantor Kecamatan Peterongan	156 peserta
8	Ngopi bareng Medsos Tema : Kopilaborasi pegiat medsos dalam rangka menunjang Publikasi Pemerintah Daerah dan Potensi Kab.Jombang	Pendopo Kabupaten Jombang	100 peserta
9	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Penguatan UMKM melalui e-katalog lokal sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi di Kab.Jombang	Pusdiklat Pramuka ,Kec.Ngoro	500 peserta
10	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Penguatan UMKM melalui e-katalog lokal sebagai upaya akselerasi pemulihan ekonomi di Kab.Jombang	Lapangan SD Losari Kec.Ploso	500 peserta
11	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Strategi Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Desa.	Kecamatan Diwek	500 peserta
12	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Regional, Tema : Strategi Penanganan Bencana melalui Mitigasi Resiko”	Kecamatan Sumobito	500 peserta
13	Dialog Interaktif Warungpojok Kebonrojo Lokal, Tema : Kewaspadaan Gagal Ginjal Akut pada Anak di Kabupaten Jombang.	Warung Lasiyem Jl.Halmahera (Timur SDN Kaliwungu 2 Jombang)	100 peserta
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno	450 peserta
		Ds. Mojoware, Kec. Mojowarno	
		Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno	
		Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang	
		Ds. Kalikejamber, Kec. Tembelang	
		Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelang	

No	URAIAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
15	Instagram @jombangkab	Instagram	17,000 pengikut
16	Pengikut di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4,999 pengikut
17	Pengikut di Youtube Jombangkab TV	Youtube	8,800 pengikut
18	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan Jadwal Talkshow Interaktif Radio - Senin 09.00 -10.00 Mitra Tani 12.00 - 13.00 Kiat Mandiri - Selasa 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 10.00 - 11.00 Plesir - Rabu 09.00 - 10.00 Pojok Literasi 12.00 - 13.00 Sehat Bersama RSUD - Kamis 09.00 - 10.00 Halo Anak 12.00 - 13.00 Pojok Tamu - Jumat 09.00 - 10.00 Pojok Demokrasi	Frekuensi 104.1 FM, live, talkshow dan streaming radio online	7,650 orang
Total			42,140

Jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -64 tahun) dari sumber Dispendukcapil adalah 952,463 orang, sosialisasi penyebaran informasi publik yaitu 42,140 orang. Realisasi kegiatan adalah 4,4% tercapai dari target 3,1% yang ditetapkan.

Sub Kegiatan pada strategis 1 dan indikator 1 adalah :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator 1 : Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi dengan target 5 media.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil diseminasi informasi telah disebarluaskan melalui media elektronik (TV dan radio), media cetak dan online, tatap muka atau dialog interaktif, Leaflet dan booklet dengan realisasi 5 media sesuai dengan target.

Indikator 2 : Jumlah program siaran radio per minggu dengan target 7 program.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil Penyebarluasan informasi radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM) yang dikemas dalam 7 program siaran. Realisasi pada tahun 2022 yaitu 7 program siaran sesuai dengan target.

Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

PROGRAM SIAR REGULER
RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Pop
04.00-07.00	-Tartil ‘Qur’an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamaluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami
07.00-08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya) ; Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA, atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan isu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)
08.00-10.00	Cakrawala Sesi II	1. INFORMASI perbincangan isu nasional 2. TALKSHOW INTERAKTIF Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiasi LPPL Jawa Timur 09.00-09.40 Insidental 10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.Id Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang) 10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang) 11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. Jombang Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang 10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.Id. Jum’at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA	Indonesia Pertengahan (boleh slow)

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
		>>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar Putar File Berita hasil produksi liputan Tim Reportase	
10.00-12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya. >> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	Mancanegara Easy Listening (Non Hits)
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik. Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi. Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisa standby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	Manca – Indo Hits
13.00-15.00	Gayeng Marem	HIBURAN Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber: Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	Gending & Campur Sari
15.00-17.00	DANSA Dangdut Asyik Suara Jombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari’ membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00-18.00	Jelang Petang	- Putar File Lagu - Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya - Putar Murattal	Lagu Religi

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
18.00-19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00-21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesia era 70-80an
22.00-23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum’at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
23.00	Closing & Lagu Wajib Nasional	Putar file lagu untuk closing siaran	
Program PERNIK			
Menit ke-			
00	Update Info Covid 19	Putar File yang diproduksi dan ready setiap hari	-
02	Informasi Hoax		
15	Lintas Informasi Lokal		
30	Info Korupsi KPK		
45	Lintas Informasi Nasional		

2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik :

- **Indikator 1 : Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID dengan target 100%.**

PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi.

Indikator sub kegiatan ditunjukkan dengan terselesaikannya 8 permohonan PPID pada tahun 2022 atau realisasi 100% yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

REKAPITULASI LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID TAHUN 2022

NO	TANGGAL	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
1	02 Feb 2022	KAKI-KAKI RAKYAT	Meminta Salinan informasi data seluruh perijinan tower di Kabupaten Jombang yang sudah memiliki ijin, beserta alamat, koordinat, nama perusahaan yang mengelola dan nama pemilik	Ditindaklanjuti
2	20 April 2022	LEMBAGA PEMANTAU LAYANAN PUBLIK	1. Kepemilikan RS Pelengkap Medical Center atas ijin pemanfaatan ruang 2. Kepemilikan RS Pelengkap Medical Center atas keterangan rencana kota 3. Kepemilikan RS Pelengkap Medical Center atas UKL-UPL 4. Kepemilikan RS Pelengkap Medical Center atas Andalalin 5. Kepemilikan RS Pelengkap Medical Center atas ijin mendirikan bangunan/ PBG 6. Kepemilikan RS Pelengkap Medical Center atas ijin operasional	Ditindaklanjuti
3	25 April 2022	1. LEO BUDI PRASETYO 2. HARIYANTO MUSPITO	1. Penerimaan dan penyaluran dana desa tahun 2020 sampai tahun 2022 dari rek Bank jatim dan atau Bank Umum Mitra yang telah ditunjuk dan disetujui sebagai Bank Umum Mitra penempatan uang negara ke Rek Kas desa se Kabupaten Jombang 2. Mekanisme pemindahbukuan sisa anggaran kas desa tahun 2020 sampai tahun 2022 dari Rek Bank jatim dan atau bank Umum Mitra yang telah ditunjuk dan disetujui sebagai Bank Umum Mitra penempatan uang negara ke Rek bank Jombang 3. Pemindahbukuan sisa anggaran kas desa tahun 2020 sampai tahun 2022 dari Rek Bank jatim dan atau bank Umum Mitra yang telah ditunjuk dan disetujui sebagai Bank Umum Mitra penempatan uang negara	Ditindaklanjuti

NO	TANGGAL	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
			dipindahbukukan ke Rek Bank Jombang 4. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur utama Bank Jombang terkait bank Jombang menjadi Bank Umum Mitra penempatan uang negara 5. Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh direktur utama Bank Jombang untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang negara 6. Surat keterangan kesehatan Bank Jombang minimal 3 komposit yakni periode tahun 2020 yang telah diverifikasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) 7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tahun 2020 sampai tahun 2022 tentang persetujuan permohonan Bank Jombang menjadi bank Umum Mitra penempatan uang negara.	
4	23 Mei 2022	ALIANSI MASYARAKAT PROLETAR	1. Pengadaan bibit durian bido T.A 2021 dan Pagu anggaran Rp. 120.780.000 2. Pengadaan bibit kelapa hibrida T.A 2021 dan Pagu anggaran Rp.190.500.000 3. Pengadaan bibit jeruk nipis T.A 2021 dan Pagu anggaran Rp. 631.710.000 4. Pengadaan bibit jagung manis, benih kacang Panjang, benih semangka, bibit cabe rawit dan bibit tomat T.A 2021 dan Pagu anggaran Rp. 77.790.000	Ditindaklanjuti
5	05 Okt 2022	ALIANSI MASYARAKAT PROLETAR	1. Pengadaan alat laboratorium TIK SMP Kode RUP : 29779610, Total Pagu Rp. 20.762.347.000, metode pemilihan E-Puechasing T.A 2021 2. Pengadaan media Pendidikan (DAK) Kode RUP : 28173528 Total Pagu Rp. 2.667.600.000, metode pemilihan E-Purchasing T.A 2021	

NO	TANGGAL	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
6	13 Okt 2022	NANANG KUSPRATOMO	1. Apa RS Pelengkap Medical Center yang beralamat di jalan Juanda No. 3 Jombang sudah memiliki persetujuan lingkungan 2. Apa RS Pelengkap Medical Center yang beralamat di jalan Juanda No. 3 Jombang sudah memiliki perijinan berusaha 3. Apa RS Umum Tipe D yang ada di wilayah hukum Kabupaten Jombang sudah memiliki persetujuan lingkungan dan perijinan berusaha 4. Apa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perijinan berusaha 5. Siapa yang berwenang menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perijinan berusaha	Ditindaklanjuti
7	31 Okt 2022	NANANG KUSPRATOMO	Siapa pejabat/ OPD yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan RS Umum Kelas D Pelengkap Medical Center dan RS Umum Kelas D lainnya di wilayah hukum Kabupaten Jombang	Ditindaklanjuti
8	18 Des 2022	PC PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JOMBANG	Dokumen RENSTRA dan RENJA BAKESBANGPOL dan DISPORAPAR	Ditindaklanjuti

▪ **Indikator 2 : Persentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti dengan target 100%**

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil pengaduan di kanal SP4N LAPOR. Pada tahun 2022 Dinas Kominfo tidak ada aduan di SP4N LAPOR. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Optimalisasi SP4N LAPOR dengan ditindaklanjutinya laporan ditunjang dengan sosialisasi LAPOR SP4N yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Tahun 2022 Sosialisasi Lapor SP4N Goes To Pesantren dilaksanakan di Desa Kwaron Kecamatan Diwek sebanyak 70 peserta.

- **Indikator 3 : Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan dengan target 5 desa.**

Indikator ini ditunjukkan dengan terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat kepada pengurus KIM. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan di Desa Kwaron Kecamatan Diwek dengan Tema “Pelatihan dan Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi Desa melalui website dan podcast.

Indikator Strategis 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dengan target 84 (baik)

Hasil penilaian dari Survei Kepuasan masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik merupakan hasil dari penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan kominfo berupa kepuasan masyarakat terhadap unsur layanan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan Penambahan Titik Jaringan;
- (2) Pelayanan Publikasi Informasi di Portal;
- (3) Pelayanan Penanganan Aduan Gangguan Layanan IT;
- (4) Pelayanan Penitipan Server (Co-Location);
- (5) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang.

Penilaian melalui aplikasi SUKMASANTRI realisasi dari IKM Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 86.48 tercapai dari target 84

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**

Indikator 1 : Persentase data Sektor yang dipublikasikan dengan target 100%. Indikator pada program ini ditunjukkan dengan terpublikasinya data di website sambang.jombangkab.go.id dengan realisasi 100%.

Data yang dipublikasikan sebagai berikut :

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Profesionalitas ASN
		2	Jumlah ASN
		3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
		4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		5	Jumlah Non ASN
		6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan
		7	Nilai Sistem Merit
		8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
		9	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
		10	Persentase Pelanggaran Pegawai
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	Data Potensi Konflik Ipoleksosbud
		12	Jumlah Kasus Unjuk Rasa
		13	Jumlah Korban Pertikaian Antar Warga
		14	Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga
		15	Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa
		16	Jumlah Pertikaian Antar Warga
		17	Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga
		18	Kerugian Material Akibat Unjuk Rasa
		19	Korban Unjuk Rasa
		20	Ormas dan LSM
		21	Partai politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	Indeks Risiko Bencana
		23	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
		24	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		25	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		26	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
4	Badan Pendapatan Daerah	27	Jumlah dan jenis Pajak Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	28	Indeks Pengelolaan Aset
		29	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		30	Opini BPK terhadap laporan keuangan
		31	Penetapan APBD
		32	Perkembangan APBD
		33	Presentase SILPA
		34	Presentase SILPA terhadap APBD
6	BAPPEDA	35	Indeks Gini
		36	Indeks Good Governance (IGG)
		37	Indeks Kesalehan Sosial
		38	Indeks Kesehatan
		39	Indeks Pembangunan Manusia
		40	Indeks Perencanaan
		41	Inflasi Kabupaten
		42	Konsumsi per kapita yang disesuaikan
		43	PDRB ADHB
		44	PDRB ADHK
		45	PDRB Per Kapita
		46	Pertumbuhan Ekonomi
		47	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
		48	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)
		49	Tingkat kemiskinan
		50	Tingkat Pengangguran Terbuka
		51	Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun)
8	BAGIAN ORGANISASI	52	Hasil
		53	Hasil Antara Perubahan
		54	Indeks Kepuasan Masyarakat
		55	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		56	Indeks Pelayanan Publik
		57	Indeks Reformasi Birokrasi
		58	Pengungkit (Pemenuhan)
		59	Reform
9	BAGIAN BARANG JASA	60	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa
10	DISPORAPAR	61	Jumlah cabang olahraga berprestasi provinsi/nasional
		62	Jumlah gedung olahraga
		63	Jumlah klub olahraga
		64	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional
		65	Kunjungan wisata
		66	PAD Sektor Pariwisata

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
11	DISPENDUKCAPIL	67	Rata-rata lama wisatawan tinggal
		68	Jumlah penduduk
		69	Kepadatan penduduk
		70	Kepemilikan akta kelahiran (Akta kelahiran penduduk yang berusia 0-17 tahun)
		71	Kepemilikan KTP Elektronik
		72	Penduduk yang memiliki NIK
		73	Penerbitan akta perkawinan
		74	Perkembangan jumlah penduduk
		75	Perkembangan jumlah penduduk menurut umur dan gender laki - laki
		76	Perkembangan jumlah penduduk menurut umur dan gender Perempuan
		77	Rasio ketergantungan penduduk
12	DINAS KESEHATAN	78	Rasio ketergantungan total
		79	Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten
		80	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
		81	Angka Kejadian Malaria
		82	Angka Kematian Bayi
		83	Angka Kematian Ibu
		84	Angka Kesakitan Penderita DBD
		85	Angka Kesehatan ODGJ
		86	Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
		87	Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta
		88	Angka Kesehatan Orang dengan TB
		89	Angka Kesehatan Penderita DM
		90	Angka Kesehatan Penderita Hipertensi
		91	Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosis
		92	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani
		93	Cakupan Desa Siaga Aktif
		94	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
		95	Cakupan Jaminan Kesehatan

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		96	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
		97	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA+
		98	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
		99	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		100	Kejadian Luar Biasa
		101	Kunjungan Neonatal
		102	Pelayanan Kesehatan Balita
		103	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		104	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		105	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		106	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
		107	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
		108	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
		109	Penderita Diare Yang Ditangani
		110	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
		111	Posyandu Aktif
		112	Presentase Desa ODF
		113	Prevalensi Gizi Buruk
		114	Prevalensi Gizi Kurang
		115	Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk
		116	Rasio Posyandu
		117	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
		118	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
		119	Rasio Tenaga Medis per penduduk
		120	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
		121	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian
		122	Stunting
		123	Tingkat Kematian Akibat Malaria

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		124	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	125	Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Energy)
		126	Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Protein)
		127	Angka konsumsi energi dan protein
		128	Desa berdasarkan kerentanan pangan
		129	Distribusi dan akses pangan
		130	Jumlah produksi garam
		131	Jumlah produksi perikanan
		132	Jumlah produktivitas garam
		133	Jumlah produktivitas ikan
		134	Kebutuhan ketahanan pangan dalam mengatasi covid 19
		135	Ketersediaan energi dan protein
		136	Konsumsi ikan
		137	penanganan kerawanan pangan
		138	Penganekaraman dan keamanan pangan daerah
		139	Rasio pangan daerah
		140	Rata-rata cadangan pangan masyarakat
		141	Skor pola pangan harapan
14	DISKOMINFO	142	Data informasi sektoral
		143	Indeks SPBE
		144	Jumlah jaringan komunikasi
		145	Jumlah jaringan telepon genggam
		146	Jumlah jaringan telepon stasioner
		147	Jumlah penyiaran radio/tv lokal
		148	Jumlah surat kabar Nasional/Lokal
		149	Persentase penduduk yang menggunakan HP
		150	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		151	Total jaringan komunikasi
		152	Website milik pemerintah daerah
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	153	Jumlah Koperasi Aktif
		154	Jumlah Koperasi Sehat

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		155	Jumlah usaha mikro
		156	Persentase jumlah koperasi sehat dan aktif
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	157	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		158	Jumlah Pemantauan Status Mutu Air
		159	Jumlah perusahaan wajib AMDAL
		160	Jumlah sampah yang diolah
		161	Kasus Lingkungan
		162	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
17	DINAS PUPR	163	Bangunan Irigasi Sekunder
		164	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		165	Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
		166	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang
		167	Ketaatan terhadap Rencana tata ruang wilayah (rtrw)
		168	Kondisi Jaringan irigasi primer, sekunder (Jaringan & Bangunan Irigasi Sekunder)
		169	Luas Wilayah Produktif
		170	Panjang Jaringan Jalan Desa berdasarkan Kodisi
		171	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan kondisi
		172	Penggunaan lahan berdasarkan RTRW
		173	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		174	Rasio
		175	Rasio Jaringan Irigasi
		176	Rasio luas Areal layanan irigasi kondisi baik
		177	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
		178	Rasio rekomendasi teknis IMB
		179	Sekunder
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	180	Badan Usaha Milik Desa

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		181	PKK aktif
		182	Status Desa
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	183	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
		184	Jumlah izin yang dikeluarkan
		185	Jumlah pengaduan
		186	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
		187	Lama Proses Perizinan
		188	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	189	Angka Kelulusan Sekolah
		190	Angka Melanjutkan Sekolah
		191	Angka Pendidikan yang ditamatkan
		192	Angka Putus Sekolah
		193	APK Paud, SD, SMP, Kecamatan
		194	APM SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan
		195	APS SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan
		196	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
		197	Indeks Pendidikan
		198	Jumlah gedung kesenian
		199	Jumlah Gedung SD Per Kecamatan
		200	Jumlah Gedung SMP Per Kecamatan
		201	Jumlah grup kesenian
		202	Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan
		203	Perkembangan kondisi Bangunan
		204	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan
		205	Rasio Guru Murid
		206	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SD,SMP,Kecamatan
		207	Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya
21	DINAS PPKB dan PPPA	208	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15â€“19) per 1.000 perempuan usia 15â€“19 tahun (ASFR 15â€“19)

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		209	Angka kelahiran Total
		210	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
		211	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
		212	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
		213	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
		214	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
		215	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
		216	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		217	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
		218	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		219	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
		220	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		221	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
		222	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		223	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
		224	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
		225	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
		226	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
		227	Indeks Pembangunan Gender
		228	Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
		229	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga
		230	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
		231	Jumlah organisasi perempuan yang dibina
		232	Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak
		233	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
		234	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Kabupaten Jombang
		235	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		236	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
		237	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
		238	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
		239	Persentase korban yang mendapatkan layanan secara tuntas
		240	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
		241	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
		242	Rasio akseptor KB
		243	Rasio KDRT
		244	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
		245	Rata-rata jumlah anak per keluarga
		246	Rata-rata usia kawin pertama wanita
		247	Ratio Akseptor KB
		248	Standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak
		249	Total Fertility Rate (TFR)
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	250	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
		251	Cakupan bina kelompok pengrajin
		252	Jumlah pasar daerah
		253	Jumlah pedagang yang dapat ditampung di pasar
		254	Kinerja nilai ekspor bersih
		255	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan
		256	Volume usaha industri kecil dan menengah

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
23	DINAS PERHUBUNGAN	257	Angkutan darat dan penumpang
		258	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
		259	Izin trayek perdesaan
		260	Jangka waktu proses KIR
		261	Jaringan trayek terlayani
		262	Jumlah kendaraan wajib uji
		263	Jumlah kendaraan yang mati uji KIR
		264	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
		265	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
		266	Jumlah pemasangan rambu-rambu
		267	Jumlah terminal
		268	Jumlah uji kir angkutan umum
		269	Kualitas layanan transportasi
		270	Pemasangan Rambu-rambu
		271	Perlengkapan jalan
		272	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
		273	Rasio ijin trayek
		274	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
		275	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	276	Hasil Pengawasan Kearsipan / Kualitas Pengelolaan Arsip
		277	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
		278	Jumlah perpustakaan yang dibina
		279	Jumlah unit kearsipan yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan
		280	Koleksi buku di perpustakaan umum
		281	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
25	DINAS PERTANIAN	282	Indeks Keberlanjutan Usaha Tani
		283	Kelembagaan sektor pertanian
		284	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan & perikanan
		285	Nilai Tukar Petani

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		286	Produksi komoditas perkebunan
		287	Produksi tanaman hortikultura
		288	Produksi tanaman pangan utama
		289	Produktivitas komoditas perkebunan
		290	Produktivitas tanaman hortikultura
		291	Produktivitas tanaman pangan utama
26	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	292	Indeks Infrastruktur Permukiman
		293	Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman
		294	Penanganan RTLH yang direhab
		295	Penyedia dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
		296	Persentase rumah bersanitasi
		297	Rasio rumah tangga pengguna air bersih
		298	Rasio TPU per penduduk
27	DINAS PETERNAKAN	299	Konsumsi daging, telur, susu
		300	Populasi ternak
		301	Produksi daging, telur, susu
28	DINAS SATPOL PP	302	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		303	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
		304	Jumlah Tenaga Linmas
		305	Rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk
29	DINAS SOSIAL	306	Jumlah PMKS
		307	Jumlah sarana sosial
		308	Sosial Permendagri
30	DINAS TENAGA KERJA	309	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per tahun
		310	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
		311	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek
		312	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
		313	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

No	PERANGKAT DAERAH PRODUSEN DATA/PENGELOLA DATA	No	DATA BERBAGI PAKAI DAN TERSEDIA
1	2	3	4
		314	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
		315	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
		316	Jumlah Transmigrasi
		317	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
31	Inspektorat	318	Capaian Kapabilitas APIP
		319	Capaian Maturitas SPIP
32	SEKRETARIAT DPRD	320	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Dewan
		321	Rasio ketergantungan total
		322	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
		323	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD
		324	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Indikator 2 : Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika. Indikator pada program ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan target 3,51. Hasil Penerapan standar pelayanan pada Dinas Kominfo yaitu 2,35 (cukup/dengan catatan), realisasi tahun 2022 yaitu 66,76 tidak tercapai dari target yang diperjanjikan. Dari monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan ada beberapa aspek penerapan standar

pelayanan dan Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai. Dari hasil rekomendasi perlu adanya sejumlah perbaikan meliputi :

- **Aspek Kebijakan Pelayanan**

- a) Agar Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan (SP) untuk jenis layanan dengan asas dan komponen sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Agar menetapkan 80% dari jumlah seluruh jenis layanan yang ada;
- c) Agar pelayanan dilaksanakan dengan sistem antrian;
- d) Agar dalam penyusunan SP melibatkan seluruh unsur masyarakat, memperhatikan hasil SKM dan pengaduan masyarakat;
- e) Menetapkan SP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disosialisasikan, melibatkan masyarakat dalam penyusunannya dan dilakukan monitoring secara periodik;
- f) SP yang ditetapkan agar memberikan kemudahan persyaratan, prosedur, dan kepastian layanan tersedianya pengelolaan konsultasi dan pengaduan;
- g) Agar menyelenggarakan survei setiap 1 bulan sekali pada pengguna layanan yang permohonannya disetujui maupun ditolak;
- h) Saran dan rekomendasi agar ditindaklanjuti untuk dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan penyelenggara;
- i) Saran, kritik dan rekomendasi ditindaklanjuti kurang dari 1 bulan setelah laporan SKM yang diterbitkan.

- **Aspek Profesionalisme SDM**

- a) Unit Layanan agar menyediakan minimal 80% jumlah pelaksana dengan kompetensi sesuai jenis layanan;
- b) Jam Kerja layanan sesuai jam kerja dinas tanpa jeda waktu istirahat untuk seluruh layanan dan bila memungkinkan dapat dilakukan penambahan waktu ekstra pelayanan;
- c) Agar memberikan respon layanan secepatnya;
- d) Agar menetapkan kebijakan pemberian penghargaan sesuai ketentuan perundangan;
- e) Pelaksana layanan mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama, PIN/atribut/logo unit pelayanan, mempraktekkan 5S.

- **Aspek Sarana dan Prasarana**

- a) Menyediakan tempat parkir dalam area kantor dengan petugas parkir, CCTV, pemeriksaan karcis/kartu parkir dan STNK, serta ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

- b) Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas televisi, bahan bacaan, monitor antrian, AC/sirkulasi udara, air minum dan fasilitas penunjang;
- c) Agar menyediakan toilet untuk pengguna layanan;
- d) Agar menyediakan fasilitas khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus;
- e) Agar menyediakan kantin dan layanan fotocopy;
- f) Agar menyediakan sarana konsultasi tatap muka langsung
- g) Agar menyediakan sarana pengaduan secara tatap muka langsung
- **Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik**
 - a) Agar mengupayakan tersedianya aplikasi pendukung layanan yang meliputi data informasi pelayanan, aplikasi otomasi proses kerja (business process), keuangan, sistem pengelolaan pengaduan, SKM dan SDM;
 - b) Agar menyediakan sarana informasi layanan non elektronik (booklet, leaflet, banner, baliho dan sebagainya);
- **Aspek Konsultasi dan Pengaduan**
 - a) Agar menyediakan sarana dan petugas layanan konsultasi;
 - b) Agar proses konsultasi terdokumentasi, minimal arsip manual;
 - c) Agar menyediakan sarana dan petugas layanan pengaduan;
 - d) Agar proses pengaduan terdokumentasi, minimal arsip manual
- **Inovasi**
 - a) Inovasi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan, memberi manfaat kepada masyarakat dan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi

Dari hasil rekomendasi penilaian SPP akan ditindaklanjuti pada tahun 2023 agar tercapai dari target yang diperjanjikan.

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang dengan target 3 dokumen. Indikator ini berupa pengumpulan Dokumen Infografis Data Sektoral, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang terealisasi sesuai target. Dokumen Statistik Sektoral meliputi :

- Dokumen Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Dokumen Perhitungan Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Dokumen Infografis Data Sektoral
- Dokumen Indeks Kami

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang dengan target 9 kali. Untuk koordinasi terkait satu data maka telah dilakukan rapat koordinasi dan pengolahan data yang terealisasi 9 kali kegiatan meliputi :

- 3 kali Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Infografis Statistik Sektoral Kabupaten Jombang;
- 3 kali Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IK-TIK);
- 3 kali Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah data statistik sektoral yang dikelola dengan target 28 sektoral.

Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan PD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik dengan data yang dikelola adalah 28 sektoral yang realisasinya tercapai sesuai dengan target yang dipublikasikan melalui website <https://sambang.jombangkab.go.id>.

Dalam mewujudkan capaian kinerja data statistik sektoral yaitu melalui tahapan :

1. Menyusun rencana tahapan dan jadwal kegiatan operasional walidata. Agenda pertemuan rutin Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Jombang setiap triwulan bersama Pembina Data (BPS), Koordinator SDI Kabupaten Jombang (BAPPEDA) serta produsen

data Data (Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang) telah ditetapkan dan menjadi pedoman penyelenggaraan Forum SDI Kabupaten Jombang;

2. Melaksanakan Koordinasi pelaporan data sektoral per triwulan. Setiap triwulan telah diselenggarakan pertemuan rutin walidata bersama Pembina Data maupun Produsen Data terkait pengumpulan data serta pelaporan data dari perangkat daerah kepada walidata;
3. Mengkoordinasikan pengelolaan portal satu data. Untuk penyimpanan data yang ditetapkan oleh Forum SDI, maka telah dibangun portal Satu Data Kabupaten Jombang, portal tersebut telah dikembangkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan SDI (tersedia fitur perencanaan, penetapan, pengumpulan dan publikasi) dan menyimpan data prioritas yang telah ditetapkan oleh Koordinator Forum SDI Kabupaten Jombang;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan hasil pengembangan portal satu data. Portal Satu data Kabupaten Jombang yang telah dikembangkan bisa terkoneksi secara langsung dengan portal Satu Data Provinsi Jawa Timur (SATA JATIM). Data terpublikasi di portal Satu Data Kabupaten Jombang terpublikasi di portal SATA JATIM.
5. Melaksanakan Kerjasama penyusunan infografis Data Sektoral serta publikasi hasil penyusunan infografis. Menyusun Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyusunan infografis 28 data sektoral Kabupaten Jombang. Hasil infografis tersebut telah dipublikasikan dalam acara Gathering Statistik Kabupaten Jombang yang dihadiri seluruh perangkat daerah dan kecamatan serta Perguruan Tinggi Kabupaten Jombang.

3. **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan Indikator Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator).** Pada Perubahan RPJMD 2018 – 2023, Indeks SPBE merupakan target dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Dalam penilaian SPBE yang dilakukan oleh Permenpan RB, terdapat 47 indikator evaluasi SPBE. Dinas Kominfo mampu penilaian SPBE dengan 18 indikator terkait Komunikasi dan Informatika. Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) pada 18 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Target	Realisasi
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2 (terkelola)	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2 (terkelola)	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2 (terkelola)	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2 (terkelola)	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2 (terkelola)	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	1
11	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2 (terkelola)	1
12	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2 (terkelola)	1
13	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	3
14	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 (terkelola)	3
15	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2 (terkelola)	1
16	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2 (terkelola)	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2 (terkelola)	4
18	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2 (terkelola)	2
Rata-Rata			45

Rata-rata Nilai SPBE 18 indikator yaitu :
$$\frac{45}{18} = 2.5 \text{ (terkelola)}$$

No	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses SPBE	Keterangan
----	---	------------

1	1 s.d. 1,99	Rintisan
2	2 s.d. 2,99	Terkelola
3	3 s.d. 3,99	Terdefinisi
4	4 s.d. 4,99	Terpadu dan Terukur
5	5	Optimum

Pada sasaran Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 18 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

1. Kebijakan internal Arsitektur SPBE telah ditetapkan
2. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE telah ditetapkan
3. Kebijakan internal Manajemen Data telah ditetapkan
4. Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi telah ditetapkan
5. Kebijakan internal Layanan Pusat Data telah ditetapkan
6. Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra telah ditetapkan
7. Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung telah ditetapkan
8. Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan
9. Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan
10. Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan
11. Pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pengembangan aplikasi
12. Layanan Pusat Data telah digunakan pada sebagian perangkat daerah
13. Layanan Jaringan Intra telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah
14. Penggunaan Sistem Penghubung telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah
15. Manajemen Keamanan telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah
16. Manajemen Data telah dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah
17. Layanan Pengaduan telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi
18. Layanan Data Terbuka telah diterapkan dengan memberikan layanan interaksi

Dari 18 indikator SPBE di atas tercapai sesuai dengan target.

• **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Program ini mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem informasi berbasis elektronik antara lain pada penyediaan internet dan fiber optic, integrasi dan pengembangan aplikasi, regulasi terkait SPBE dan tata kelola SPBE dengan memfasilitasi integrasi dan mengeluarkan rekomendasi terhadap aplikasi yang akan dibangun dan atau yang sudah dimiliki oleh OPD, terdapat 2 indikator yaitu :

Indikator 1 : Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi dengan target level 2.

Hasil pengukuran IK-TIK berbasis kuesioner COBIT 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2022 adalah sebesar 3,06 atau dalam kategori “Baik”. Dalam Maturity Level, nilai tersebut dimasukkan dalam Level 3. Nilai IK-TIK tersebut disumbang oleh masing-masing domain yang dinilai dominan pengaruhnya dalam kinerja tata kelola TIK Kabupaten Jombang, yaitu (1) infrastruktur TI, (2) SDM, (3) pengadaan barang TI, (4) pengelolaan jaringan, pemeliharaan dan kapabilitas TI, (5) investasi TI, (6) pengelolaan kualitas TI, (7) prioritas layanan, (8) risiko TI, (9) hardware dan software, dan (10) tata kelola organisasi TI. Indikator ini realisasinya adalah level 3 tercapai dari target level 2 atau melebihi dari target tahun 2022.

Indikator 2 : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)

Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 18 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Output
1	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur kebijakan Arsitektur SPBE	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang
				Arsitektur SPBE
2	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur kebijakan Peta Rencana SPBE	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang
				Peta Rencana SPBE
3	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Manajemen Data	2 (terkelola)	1	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 32)
4	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 18 ayat 7)

No.	Indikator	Target	Realisasi	Output
5	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Layanan Pusat Data	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3)
6	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 16 ayat 2 dan pasal 16 ayat 8)
7	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3)
8	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	2 (terkelola)	3	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 31 ayat 2, pasal 18 ayat 3)
9	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Audit TIK	2 (terkelola)	1	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 38 ayat 1)
10	Telah ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE	2 (terkelola)	1	Perbup Jombang No : 15 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang (pasal 42 ayat 3 dan ayat 4)
11	Telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Aplikasi SPBE	2 (terkelola)	1	Dokumen Analisis Kebutuhan Aplikasi
				Dokumen Perancangan Aplikasi
				Dokumen Pengembangan Aplikasi
				Penempatan Aplikasi Dalam Pusat Data
				Pengembangan Aplikasi e-Office
				Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang

No.	Indikator	Target	Realisasi	Output
12	Telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Layanan Pusat Data	2 (terkelola)	3	Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				SOP Pusat Data
				Dokumen Akses dan Koneksi PDN (Layanan Pusat Data Nasional Sementara)
				B.A Inventarisasi Pusat Data
13	Telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra	2 (terkelola)	3	Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				B.A Inventarisasi Jaringan
				SOP Jaringan Intra
				Laporan Kegiatan Penyediaan Jaringan F.O
14	Telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penggunaan Sistem Penghubung	2 (terkelola)	1	Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Petunjuk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				Dokumen API
				SOP Sistem Penghubung Layanan Daerah
				B.A Sistem Penghubung Layanan Daerah
15	Telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Manajemen Keamanan	2 (terkelola)	3	Surat Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Pedoman Manajemen SPBE dan Audit TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
				Assesment KAMI
				SOP Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Elektronik
				Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
16	Telah ditetapkan Peraturan Bupati dan Peraturan Sekretaris Daerah yang	2 (terkelola)	4	Perbup Jombang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data

No.	Indikator	Target	Realisasi	Output
	mengatur Penyelenggaraan Manajemen Data			Indonesia Kabupaten Jombang Surat Keputusan Sekda Kabupaten Jombang Tentang Pedoman Manajemen SPBE dan Audit TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
17	Telah tersedia Layanan Pengaduan yang memberikan fitur layanan pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen	2 (terkelola)	2	Layanan Lapor SP4N
18	Telah tersedia Layanan Data Terbuka yang memberikan fitur layanan pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen	2 (terkelola)	2	Layanan Aplikasi Satu Data dan Joss
Rata-Rata			45	

Rata-rata Nilai SPBE 18 indikator yaitu : $\frac{45}{18} = 2.5$ (terkelola)

No	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses SPBE	Keterangan
1	1 s.d. 1,99	Rintisan
2	2 s.d. 2,99	Terkelola
3	3 s.d. 3,99	Terdefinisi
4	4 s.d. 4,99	Terpadu dan Terukur
5	5	Optimum

Dari 18 indikator SPBE di atas tercapai sesuai dengan target.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan target 100%.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 mengamanatkan bahwa jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan

informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Simpul jaringan sebagaimana dimaksud terdiri dari : (1) Perangkat daerah (termasuk kantor, kecamatan, kantor kelurahan dan kantor unit pelaksana teknis; (2) Satuan Pendidikan; (3) Pemerintah Desa; (4) Instansi Pemerintahan/publik strategis lainnya.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Jaringan Intra diselenggarakan oleh Dinas Kominfo yang menggunakan penyedia jasa akses internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2022 Jaringan Intra sudah terhubung pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang sehingga target 100% telah tercapai pada indikator ini.

Indikator 2 : Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain dengan target 100%.

Indikator ini mengacu pada Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara bahwa domain utama di Pemerintahan Kabupaten Jombang yaitu jombangkab.go.id, sedangkan subdomain yaitu namaaplikasi/opd.jombangkab.go.id. Target 100% merupakan Penetapan Sub Domain Website Pemerintah Kabupaten Jombang dan nama email resmi dengan domain jombang.kab.go.id, maka bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membuat/membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting dan email resmi kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Jombang sesuai dengan regulasi Perbup Jombang No 15 Tahun 2021 Tentang SPBE dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Realiasi indikator ini yaitu 100% atau 100% dari target yang ditetapkan.

Daftar Subdomain di Pemerintah Kabupaten Jombang :

NAMA SISTEM ELEKTRONIK		LINK	KETERANGAN
1	E-SULASH	https://e-sulash.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga

NAMA SISTEM ELEKTRONIK		LINK	KETERANGAN
2	SPSE	https://lpse.jombangkab.go.id/eproc4/	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
3	SIBAJA	http://sibaja.jombangkab.go.id/login	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	SIAP-ASN	https://siapasn.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Penataan ASN
5	E-SAKIP	http://e-sakip.jombangkab.go.id/	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6	E-OFFICE	https://e-office.jombangkab.go.id/	Sistem Aktivitas Kepegawaian (TPP)
7	E-AUDIT	https://inspektorat.jombangkab.go.id/	sistem pengawasan internal pemerintah Kabupaten
8	JOS	https://jos.jombangkab.go.id/	Jombang One System (aplikasi integrasi perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan)
9	SATUDATA	https://satudata.jombangkab.go.id/	Pusat Data Kabupaten Jombang
10	JDIH	https://jdih.jombangkab.go.id/	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
11	SIRINDUNONA	https://perizinan.jombangkab.go.id/	Sistem aplikasi pelayanan perizinan non berusaha

NAMA SISTEM ELEKTRONIK		LINK	KETERANGAN
12	SIMPADDU	https://bapenda.jombangkab.go.id/simpadu/ex1s/index.php	Sistem Informasi Pajak Daerah Online
13	SABDOPALON	https://sabdopalon.jombangkab.go.id/	Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa
14	DUKCAPIL/YAONAH	https://dukcapil.jombangkab.go.id/yaonah	Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	SILAJANG	https://silajang.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Laboratorium Jombang
16	ADAPTIF	https://adaptif.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Tanam dan Panen di Kabupaten Jombang
17	SIMFONI	https://simfoni.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi GAPOKTAN
18	SIMENARA	https://simenara.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Berbasis Geografis (Peta)
19	SIDAVID	https://sidavid.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Data Covid
20	LAKSAMANA	https://laksamana.jombangkab.go.id/	Aplikasi Layanan Kerjasama Jombang
21	INTUISI	https://intuisi.jombangkab.go.id/	Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG)
22	INLIS LITE	https://inlis.jombangkab.go.id/lite	Integrated Library System

NAMA SISTEM ELEKTRONIK		LINK	KETERANGAN
			(Layanan Anggota Perpustakaan)
23	SRIKANDI	https://srikandi.jombangkab.go.id/	Layanan Persuratan dan Kearsipan
24	BLONJO	https://blonjo.jombangkab.go.id/	Aplikasi Belanja Produk UMKM
25	Website perangkat daerah	https://bkpsdm.jombangkab.go.id	BKPSDM
26		https://bapenda.jombangkab.go.id	Bapenda
27		https://bappeda.jombangkab.go.id	Bappeda
28		https://perizinan.jombangkab.go.id	Perizinan
29		https://pertanian.jombangkab.go.id	Pertanian
30		https://disdagrin.jombangkab.go.id	Disdagrin
31		https://sikembang.jombangkab.go.id	Disporabudpar
32		https://disdikbud.jombangkab.go.id	Disdikbud
33		https://pupr.jombangkab.go.id	PUPR
34		https://dlh.jombangkab.go.id	Dlh
35		https://dukcapil.jombangkab.go.id	Dukcapil
36		https://dinkes.jombangkab.go.id	Dinkes
37		https://ploso.jombangkab.go.id	Kecamatan Ploso
38		https://rsudjombang.jombangkab.go.id	RSUD Jombang

Email yang terdaftar menggunakan subdomain terdapat 70 email resmi yang menggunakan domain resmi jombangkab.go.id tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TIK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 13 Juli 2022. Realisasi pada subkegiatan ini yaitu 100%.

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain dengan target 64 subdomain.

Indikator ini merupakan standar Penetapan Sub Domain Website, Email serta aplikasi Pemerintah Kabupaten Jombang, Saat ini subdomain yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 38 aplikasi dan website sesuai dengan standart subdomain dan 70 email resmi sesuai dengan standart subdomain. Realiasi indikator ini tercapai 108 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 64 subdomain.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah dengan target 68 titik.

Penerapan Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang membutuhkan kecepatan dalam pengelolaan data dan informasi melalui infrastruktur teknologi informasi melalui koneksi jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Kondisi eksisting jaringan intra fiber optic yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu ada di antar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, lokasi – lokasi penempatan CCTV di lokasi strategis dan lokasi – lokasi wifi gratis sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Jombang yang memiliki standar penyelenggaraan jaringan intra terdapat 68 titik. Realisasi pada indikator ini yaitu 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

LAPORAN PENYEDIAAN JARINGAN INTERNET

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA LOKASI	TITIK	JENIS KONEKSI	IP WAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DISDIKBUD		FIBER OPTIK	10.10.70.41
2	DINAS KESEHATAN	DINKES		FIBER OPTIK	10.10.70.1
3		GUDANG FARMASI		FIBER OPTIK	10.10.70.136
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	RSUD JOMBANG		FIBER OPTIK	10.10.70.125
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	RSUD PLOSO		FIBER OPTIK	10.10.70.114

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA LOKASI	TITIK	JENIS KONEKSI	IP WAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR		FIBER OPTIK	10.10.70.101
7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERKIM		FIBER OPTIK	10.10.70.105
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATPOL PP		FIBER OPTIK	10.10.70.57
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD		FIBER OPTIK	10.10.70.9
10	DINAS SOSIAL	DINSOS		FIBER OPTIK	10.10.70.109
11	DINAS TENAGA KERJA	DISNAKER		FIBER OPTIK	10.10.70.25
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAPRIK		FIBER OPTIK	10.10.70.89
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH		FIBER OPTIK	10.10.70.53
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL		FIBER OPTIK	10.10.70.141
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DPMD		FIBER OPTIK	10.10.70.37
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DPPKB-PPPA (KANTOR PUSAT)		FIBER OPTIK	10.10.70.81
17		DPPKB-PPPA (KANTOR URIP SUMOHARJO)		FIBER OPTIK	10.10.70.157
18		DPPKB-PPPA (RUMAH PINTAR)		FIBER OPTIK	
19	DINAS PERHUBUNGAN	DISHUB		FIBER OPTIK	10.10.70.97
20		UPT PKB		FIBER OPTIK	10.10.70.145
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO (KANTOR PUSAT)		FIBER OPTIK	10.10.70.45
22		DISKOMINFO (APTIKA)		FIBER OPTIK	10.10.71.21
23		DISKOMINFO (SJFM)		FIBER OPTIK	10.10.70.129
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINKOPUM		FIBER OPTIK	10.10.70.73
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP		FIBER OPTIK	10.10.70.77
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	DISPORAPAR		FIBER OPTIK	10.10.70.113
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DISPERSIP (PERPUSTAKAAN)		FIBER OPTIK	10.10.70.29
28		DISPERSIP (ARSIP)		FIBER OPTIK	10.10.70.169
29	DINAS PERTANIAN	DISPERTA		FIBER OPTIK	10.10.70.92
30	DINAS PETERNAKAN	DISNAK		UTP	10.10.70.85
31	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DISDAGRIN		FIBER OPTIK	10.10.70.17

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA LOKASI	TITIK	JENIS KONEKSI	IP WAN
32	SEKRETARIAT DPRD	SETWAN		FIBER OPTIK	10.10.81.69
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA		FIBER OPTIK	10.10.70.13
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPKAD		FIBER OPTIK	10.10.70.61
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA		FIBER OPTIK	10.10.70.189
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM		FIBER OPTIK	10.10.70.5
37	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT		FIBER OPTIK	10.10.70.117
38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGP OL		FIBER OPTIK	10.10.70.69
39	KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO	KEC. BANDAR KEDUNG MULY O		FIBER OPTIK	10.10.72.185
40	KECAMATAN BARENG	KEC. BARENG		FIBER OPTIK	10.10.72.15
41	KECAMATAN DIWEK	KEC. DIWEK		FIBER OPTIK	10.10.72.9
42	KECAMATAN GUDO	KEC. GUDO		FIBER OPTIK	10.10.72.19
43	KECAMATAN JOGOROTO	KEC. JOGOROTO		FIBER OPTIK	10.10.72.73
44	KECAMATAN JOMBANG	KEC. JOMBANG		FIBER OPTIK	10.10.72.1
45	KELURAHAN JELAKOMBO	KEL. JELAKOMBO		FIBER OPTIK	10.13.4.1
46	KELURAHAN JOMBATAN	KEL. JOMBATAN		FIBER OPTIK	10.13.2.1
47	KELURAHAN KALIWUNGU	KEL. KALIWUNGU		FIBER OPTIK	10.13.1.1
48	KELURAHAN KEPANJEN	KEL. KEPANJEN		FIBER OPTIK	10.13.3.1
49	KECAMATAN KABUH	KEC. KABUH		FIBER OPTIK	10.10.72.76
50	KECAMATAN KESAMBEN	KEC. KESAMBEN		FIBER OPTIK	10.10.72.51
51	KECAMATAN KUDU	KEC. KUDU		FIBER OPTIK	10.10.72.62
52	KECAMATAN MEGALUH	KEC. MEGALUH		FIBER OPTIK	10.10.72.57
53	KECAMATAN MOJOAGUNG	KEC. MOJOAGUNG		FIBER OPTIK	10.10.72.145
54	KECAMATAN MOJOWARNO	KEC. MOJOWARNO		FIBER OPTIK	10.10.72.161
55	KECAMATAN NGORO	KEC. NGORO		FIBER OPTIK	10.10.72.19
56	KECAMATAN NGUSIKAN	KEC. NGUSIKAN		FIBER OPTIK	10.10.72.168
57	KECAMATAN PERAK	KEC. PERAK		FIBER OPTIK	10.10.72.65
58	KECAMATAN PETERONGAN	KEC. PETERONGAN		FIBER OPTIK	10.10.72.153
59	KECAMATAN PLANDAAN	KEC. PLANDAAN		FIBER OPTIK	10.10.72.127
60	KECAMATAN PLOSO	KEC. PLOSO		FIBER OPTIK	10.10.72.89
61	KECAMATAN SUMOBITO	KEC. SUMOBITO		FIBER OPTIK	10.10.72.71
62	KECAMATAN TEMBELANG	KEC. TEMBELANG		FIBER OPTIK	10.10.72.121
63	KECAMATAN WONOSALAM	KEC. WONOSALAM		FIBER OPTIK	10.10.72.24
64	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA LT. 1		FIBER OPTIK	10.10.71.41
65		SETDA LT. 2		FIBER OPTIK	10.10.71.45
66		PENDOPO		FIBER OPTIK	10.10.70.121

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA LOKASI	TITIK KONEKSI	JENIS IP WAN
67		RUMDIN BUPATI	FIBER OPTIK	10.10.70.138
68		RUMDIN WABUP	FIBER OPTIK	10.10.70.133

➤ **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Persentase Aplikasi yang terintegrasi dengan target 20%.
 Aplikasi yang terintegrasi merupakan aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintah kabupaten Jombang yang telah terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). Aplikasi yang telah terintegrasi sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN	NAMA APLIKASI	KETERANGAN APLIKASI	PERANGKAT DAERAH
1	LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	E-OFFICE	- Sistem layanan aktivitas pegawai - Terintegrasi dengan Siap ASN	DISKOMINFO, BAG. ORGANISASI
		JOS	- Sistem aplikasi yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan; - Terintegrasi dengan SIPD	DISKOMINFO, BAPPEDA, DAN BAGIAN PEMBANGUNAN
		INTUISI	- Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (SIKS-NG) - Terintegrasi dengan SIAK	DINSOS

NO	JENIS LAYANAN	NAMA APLIKASI	KETERANGAN APLIKASI	PERANGKAT DAERAH
		e-SULASH	- Sistem Informasi Usulan Standar Harga - Terintegrasi dengan SIPD	DPKAD dan BAG. PEMBANGUNAN
		SIAP ASN	- Sistem administrasi layanan kepegawaian asn - Terintegrasi dengan e-office	BKPSDM
2	LAYANAN PUBLIK	SIMPADU	- Sistem Layanan Pajak Terpadu - Terintegrasi dengan Siak, Sirindunona dan bank jatim	DPMPTSP - DISPENDUKCAP IL
		SABDOPALON	- Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online - Terintegrasi dengan SIAK, INTUISI	DISKOMINFO, DPMD, DINSOS
		SIRINDUNON A	- Sistem Layanan Perizinan - Terintegrasi dengan SIAK, Simpadu	DISKOMINFO, DPMPTSP dan BAPENDA

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun dengan target 2 dokumen. Realisasi pada sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yang tercapai 100% dari target tahun 2022. Dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun yaitu :

- SK Pengelola Website Kabupaten Jombang Tahun 2022;
- Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Evaluasi SPBE Tahun 2022.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Indikator Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar dengan target 20%.

Pusat data (data Center) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk

keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data. Pusat Data Pemerintah daerah wajib : (1) memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional terkait desain pusat data dan manajemen pusat data; (2) membuat keterhubungan dengan pusat data nasional; (3) menyediakan fasilitas bagi pakai dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain; (4) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini merupakan standarisasi yang diberlakukan oleh Permen Kominfo terkait standar pusat data yang harus diterapkan pada lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat satu pusat data di Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Realisasi pemenuhan pusat data sesuai dengan target yaitu 25% dari 77 indikator standarisasi yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Standarisasi Pusat Data Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	
2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoroan air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar opsional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani penghantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		
27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	
51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).		√	
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99.995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

3. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan dengan target 2 aplikasi.

Pada tahun 2022 aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu :

- e-office : Sistem aplikasi kepegawaian (TPP)
- sabdopalon : Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Desa

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Indikator Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik.

Indikator pada program ini merupakan sistem elektronik yang ada di Kabupaten Jombang berfungsi dengan baik terkait transaksi elektronik dan pelayanan publiknya. Sistem elektronik yang ada telah berfungsi dengan baik sesuai dengan target 100%.

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
Indikator Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi dengan target 75%

Sertifikat elektronik pada sistem elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang didaftarkan pada BSSN (Badan Sandi Siber Negara). Rencana kerja yang telah terlaksana pada indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan pendaftaran sertifikat elektronik pada seluruh perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu bentuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Jombang adalah melalui sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik tersertifikasi/TTE) pada dokumen yang dihasilkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam rangka meningkatkan keamanan informasi pada dokumen Pemerintah Kabupaten Jombang serta mendukung penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Jombang, maka bulan Nopember 2022 ditetapkan penggunaan aplikasi Srikandi yang dilengkapi dengan TTE untuk seluruh dokumen administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombanf. Tahun 2022 pembuatan TTE sejumlah 243 (sertifikat BSrE) Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah serta Kepala UPT. Untuk mendukung layanan TTE telah diwujudkan inovasu Dinas Komunikasi dan Informatika yang diberi nama SATSET (Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik). Pemohon dan Pengguna TTE dapat mendapatkan layanan pengusulan, pembaharuan, pencabutan, perpanjangan dan pengaduan secara online dengan aplikasi SATSET, sehingga proses pelayanan tidak terbatas ruang dan waktu.
- Melaksanakan Kerjasama penyusunan Assestment Keamanan Infromasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan hasil. Untuk

mewujudkan sistem elektronik yang aman, maka perlu dilaksanakan rangkaian pengujian tingkat kemanan pada skala daerah melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan pada skala aplikasi melalui penetrasi test. Kegiatan pengujian tersebut melalui Kerjasama dengan pihak ketiga berbentuk assessment keamanan informasi. Proses pengujian melibatkan tim teknis dan perangkat daerah terkait, khususnya pengelola aplikasi strategis. Dari 4 aplikasi strategis layanan Pemerintah Kabupaten Jombang (e-office, SIAPASN, DTKS dan Sabdopalon) hasil peretasan menunjukkan bahwa 3 aplikasi dapat diretas (75%). Dari hasil pengujian tersebut telah diberikan rekomendasi dalam pengamanan aplikasi dan telah ditindaklanjuti. Untuk capaian Indeks KAMI tahun 2022 sebesar 283 (pemenuhan kerangka kerja dasar) hasil ini meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 251 (tidak layak).

- Melaksanakan Kerjasama penyusunan Desain Keamanan Informasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan hasil. Untuk membangun manajemen keamanan informasi sebagaimana diamankan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka perlu dibangun suatu Desain Keamanan Informasi (DKI) SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang dengan memperhatikan Peta Rencana SPBE dan arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang. Penyusunan DKI melalui proses Kerjasama dengan pihak ketiga dengan melibatkan tim teknis yang berasal dari Perangkat Daerah pengampu SPBE antara lain BAPPEDA, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi. Rekomendasi dan tahapan dalam membangun Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan DKI telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah pengampu SPBE;
- Mengkoordinasikan dokumen persandian dari aplikasi SANAPATI. Salah satu bentuk pengamanan informasi dari Pusat sampai dengan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) untuk dokumen administrasi pemerintahan, telah diselenggarakan pengelolaan informasi dari Kementerian/Lembaga Negara yang diinformasikan kepada Kepala Daerah dikirim melalui aplikasi SANAPATI. Seluruh dokumen dari aplikasi Sanapati telah diinformasikan kepada Kepala Daerah secara tepat waktu.

Target pada kegiatan ini yaitu 75%, pada tahun 2022 realisasi tercapat sesuai dengan target.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi sistem elektronik dengan target 3 sistem elektronik.

Untuk mewujudkan sistem elektronik yang aman, maka perlu dilaksanakan rangkaian pengujian tingkat kemanan pada skala daerah melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan pada skala aplikasi melalui penetrasi test. Dari 4 aplikasi strategis layanan Pemerintah Kabupaten Jombang (e-office, SIAPASN, DTKS dan Sabdopalon) telah dilakukan pengamanan informasi sesuai dengan rekomendasi pada dokumen Indeks KAMI. Untuk mendukung layanan sistem elektronik maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Keamanan Informasi;
- Assesment Keamanan Informasi;
- Workshop Pengamanan Informasi;
- Penyusunan Desain Keamanan Informasi

Pada sub kegiatan ini target 3 sistem elektronik telah tercapai 4 sistem elektronik dimana melebihi target sub kegiatan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP. Nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 80.01. Hasil Penilaian sebagai berikut :

No	Tahun 2022		
	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25.29
2	Pengukuran Kinerja	25	27.50
3	Pelaporan Kinerja	15	7,56
4	Evaluasi Kinerja	10	19,56
Nilai Hasil Evaluasi			80.01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP 80.01 dengan realisasi 100.01% mendapatkan predikat A “memuaskan” hasil tersebut menggambarkan instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi

hasil karena pengukuran telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pelaksana/subkoordinator.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Dibawah ini adalah penjabaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2020 dan 2021, akan tetapi dalam penjelasannya tidak serta merta dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020, sedangkan pada pada tahun 2022 s.d 2023 berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan Perubahan RPJMD. Untuk mengetahui perbandingan pencapaian sasaran kinerja dari tahun 2020- sampai dengan tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Program Tahun 2020 s.d Tahun 2022 (Dua Tahun Terakhir)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022					2020	2021	2022	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,6	n/a	n/a	1,4	n/a	n/a	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
									Meningkatnya Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Kategori Predikat PPID	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
										Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
									Meningkatnya Kinerja Sistem persandian daerah dan sistem kualitas pelayanan data statistik	Persentase informasi data/statistik sektoral daerah yang dikelola	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
Tahun 2021 s.d 2022																
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	83,5	84	n/a	85,81	86,48	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	n/a	61	62	n/a	81,6	65,51
		Indeks Pelayanan Publik di	n/a	3,51	3,52	n/a	3,164	2,35		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	83,5	84	n/a	85,81	86,48

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		bidang Komunikasi dan Informatika														
									Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	n/a	100%	100%	n/a	100%	100%
										Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	n/a	3,51	3,52	n/a	3,164	2,35
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	n/a	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	n/a	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	n/a	Level 2	Level 2	n/a	Level 2	Level 3
										Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	n/a	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	n/a	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola
									Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	n/a	50%	75%	n/a	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	n/a	78,00	79,00	n/a	80,11	80,01	Terlaksananya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	n/a	100%	100%	n/a	100%	100%

A.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 merupakan tahun kedua periode Perubahan Renstra periode tahun 2018-2023, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Tabel Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

NO	Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra		Realisasi		Tingkat Kemajuan %
			Indikator	Satuan	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perubahan Renstra (2021-2023)							
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	252	baik	172,29	baik	68,37
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	186	sedang	147,11	sedang	79,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	252	baik	172,29	baik	68,37
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	300	%	200	%	66,67
		Indeks Pelayanan Publik	10,56	baik	5,52	baik	52,28
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	26	Indikator terkelola	36	Indikator terkelola	81,82
	Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	6	level	5	level	83,34
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	44	Indikator terkelola	36	Indikator terkelola	81,82
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	300	%	200	%	66,67
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika	10,56	baik	5,52	baik	66,67

NO	Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra		Realisasi		Tingkat Kemajuan %
			Indikator	Satuan	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perubahan Renstra (2021-2023)							
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	252	baik	172,29	baik	68,37
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	186	sedang	147,11	sedang	79,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	252	baik	172,29	baik	68,37
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	300	%	200	%	66,67
		Indeks Pelayanan Publik	10,56	baik	5,52	baik	52,28
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	237	BB	160,12	BB	67,57
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300	%	200	%	66,67

A.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disandingkan dengan Level Nasional/Internasional sebagai berikut:

Tabel 3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun N	Realisasi Nasional
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	86,48	88,29
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika	2,35	3,87
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan Komunikasi dan Informatika	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80,01 (A)	84,97 (A)

Analisis Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional:

- **Indikator 1 Sasaran Strategis 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang Komunikasi dan Informatika**

Hasil IKM Nasional yaitu 88,29 sedangkan hasil IKM Dinas Kominfo yaitu 86,48 lebih rendah dibandingkan hasil nilai Nasional dengan kategori baik. Dari Pemenuhan pelayanan nilai IKM sudah tercapai dari target yang diharapkan, namun diperlukan peningkatan seperti hasil IKM Nasional. Langkah yang perlu dilakukan adalah pemenuhan sarana prasarana, penambahan petugas layanan dan peningkatan kompetensi petugas layanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

- **Indikator 1 Sasaran Strategis 2 yaitu Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika**

Hasil Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika Nasional yaitu 3,87 dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang yaitu 2,35 yang lebih rendah dibandingkan Nasional. Indikator IPP meliputi Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan saran & masukan dan sarana prasarana. Dalam hasil evaluasi tim penilaian kabupaten indikator yang perlu peningkatan yaitu terletak pada kompetensi pelaksana dan sarana prasarana. Ditahun 2023 akan diajukan penambahan personal, peningkatan kompetensi pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana terkait pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

- **Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika**

Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 2,96 (baik), sedangkan hasil Indeks SPBE Nasional yaitu 2,30 (cukup). Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang lebih tinggi dibandingkan nasional. Dalam 47 indikator tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 mengampu pada 18 indikator terkelola yang tercapai sesuai target. Sebagai bahan evaluasi Tahun 2023 agar Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika meningkat maka dibutuhkan tindak lanjut penyesuaian perubahan kebijakan terkait arsitektur SPBE mengacu pada pasal 1 PP 132/2022 dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi

proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait perubahan pada arsitektur SPBE di Kabupaten Jombang.

- **Indikator Sasaran Strategis 3 yaitu : Nilai Evaluasi AKIP**

Hasil Nilai Evaluasi AKIP Nasional yaitu 84,97 (A) dan Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kominfo yaitu 80,01 lebih rendah dibandingkan nasional. Sebagai bahan evaluasi AKIP di tahun 2023 diperlukan konsisten dan kekelarasan semua dokumen mulai dari Renstra, Renja, PK, SKP, Renaksi sehingga dapat tercapai target kinerja sesuai yang diharapkan. Selain itu monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala agar evaluasi AKIP segera ditindaklanjuti jika tidak selaras dan target tidak tercapai.

A.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dengan faktor pendorong sebagai berikut:

- a) Adanya pandemi dan trend perkembangan dunia yang mendorong kebutuhan dan transformasi layanan pemerintah dan publik secara elektronik;
- b) Adanya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis;
- c) Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah menjangkau seluruh PD;
- d) Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik;
- e) Aktifnya website Pemerintah Daerah sebagai penyajian informasi dan release secara berkala;
- f) Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan perangkat TIK harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
- g) Komitmen terhadap kebijakan satu data yang dicanangkan secara nasional dan Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik;

- h) Koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Forum Komunikasi Sandi Kabupaten Jombang terkait pembinaan persandian, peningkatankapasitas Keamanan Informasi dan penerbitan sertifikasi Elektronik.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a) Keterbatasan anggaran pengembangan sarana prasarana IT dan publikasi kinerja yang memadai;
- b) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- c) Belum diterapkannya Standart Nasional Manajemen Keamanan Nasional dan kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi.
- d) Belum semua Sistem Informasi dan database terintegasi.
- e) Masih sulitnya pemenuhan data sektoral pada OPD

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut

- a) Mengusulkan anggaran prioritas peningkatan sarana dan prasarana TIK dan publikasi;
- b) Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- c) Koordinasi yang baik dengan lembaga sandi negara sebagai Pembina persandian dan rutin melaksanakan forum komunikasi sandi kepada instansi terkait dengan memberikan informasi akan pentingnya melakukan pengamanan informasi.
- d) Optimalisasi sistem informasi di berbagai sektor layanan, Pembangunan dan pengembangan sistem informasi harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikandengan sistem informasi terkait;
- e) Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan layanan SPBE dan Smart City.

B. Realisasi Anggaran

B.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	79	80.01				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	7.821.236.581	7.458.797.006	95,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	3.652.100	2.788.750	76,36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	1.977.100	1.631.250	82,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 laporan	3 laporan	100%	1.675.100	1.157.500	69,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	100%	100%	5.125.887.318	4.873.421.315	95,07
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	14 kali	14 kali	100%	4.913.414.318	4.683.221.344	95,32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	11 kegiatan	11 kegiatan	100%	212.196.000	189.926.271	89,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	280.000	6.300	97,75

Sasaran Strategis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	799.652.000	799.648.000	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	450 orang	450 orang	100%	799.652.000	799.648.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	318.618.425	297.860.500	93,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	13.827.125	8.247.100	59,64
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	77.715.500	1.977.500	97,46
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis	100%	114.581.300	11.923.147	89,59
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	4 jenis	4 jenis	100%	44.143.500	44.081.350	62,15
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	1 jenis	1 jenis	100%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 media	3 media	100%	9.916.000	9.905.000	99,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 kali	2 kali	100%	58.435.000	57.230.897	97,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	602.851.100	555.347.533	92,12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	289.806.000	263.940.558	91,07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis	5 jenis	100%	313.045.100	291.406.975	93,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	970.575.638	929.730.908	95,79

Sasaran Strategis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%	83.160.000	77.434.658	93,12
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit	100%	13.000.000	7.193.700	55,34
	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	17 unit	17 unit	100%			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 lokasi	2 lokasi	100%	293.261.638	290.968.700	99,22
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	3 lokasi	3 lokasi	100%	581.154.000	554.133.850	95,35
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	84	86,48	102,95			
	Indeks Pelayanan publik dibidang Komunikasi dan Informatika	3,52	2,35	66.76			
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	62 (sedang)	65.51 (baik)	105,66	3.869.703.500	3.786.986.231	95,37
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	84 (baik)	86,48(baik)	102,95			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3.1	4.42	142%	3.869.703.500	3.786.986.231	95,37
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	5 media	5 media	100%	891.270.400	870.211.331	97,64
	Jumlah program siaran radio per minggu	7 program	7 program	100%			

Sasaran Strategis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100%	100%	100%	61.868.600	55.335.900	89,44
	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	5 desa	5 desa	100%			
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama	100%	2.916.564.500	2.861.439.000	98,11
	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	12.000 pengikut	17.200 pengikut	143,33%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100%	340.727.500	339.036.712	99,50
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52	2,35	66,76			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	3 dokumen	100%	340.727.500	339.036.712	99,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	9 kali	9 kali	100%	170.221.000	168.732.212	99,13
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	28 data sektoral	28 data sektoral	100%	170.506.500	170.304.500	98,87
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	100%			
Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan TIK	Level 2	Level 3	150	3.496.508.850	3.007.598.844	86,02
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	100			

Sasaran Strategis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	1.970.888.100	1.781.693.308	90,40
	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%	100%	100%			
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	64 subdomain	64 subdomain	100%	279.250.000	230.928.919	82,70
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	68 titik	68 titik	100%	1.691.638.100	1.550.764.389	91,67
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	20%	100%	1.525.620.750	1.225.905.536	80,35
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	177.492.000	174.654.966	98,40
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	25%	25 %	100%	457.333.750	170.557.443	37,29
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	890.795.000	880.693.127	98,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	203.107.400	200.813.753	98,87
Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75%	100%	100%	203.107.400	200.813.753	98,87

Sasaran Strategis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	3 sistem elektronik	3 sistem elektronik	100%	203.107.400	200.813.753	98.87

B.2 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kinerja pada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang didukung oleh sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Efisiensi didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi presentase realisasi anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. Adapun Efisiensi Anggaran Dinas Kominfo Jombang adalah sebesar 938.057.285 atau 5,96 sebesar dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.731.283.831 Sedangkan rata-rata capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang adalah sebesar 100%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	95,37	4,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	76.36	23.64
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	100	82.51	17.49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	100	69.10	30.90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100	100	4,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	100	100	4,68
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium	100	100	10,49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	pengelola keuangan			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	100	100	2,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	6,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	100	100%	6,51
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	100	100	40,36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	100	100	2,54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	100	100	10,41
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	100	100	0,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	100	100	0,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	100	2,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	100	100	8,93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	6,91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	4,21

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100	100	6,88
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	100	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	100	100	44,66
	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	100	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	100	100	0,78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	100	100	4,65
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	105,66	97,64	2,36
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	102,95		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	100	97,64	2,36
	Jumlah program siaran radio per minggu	100		
Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100	89,44	10,56
	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100		
	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	100		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	100	98,11	1,89

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	143,33		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan TIK	150	86.02	13.80
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	100		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	90,40	9,60
	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100		
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	100	82,70	17,30
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	100	91,67%	8,33
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	100	80.35	19.65
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	100	98.40	1.60
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	100	37.29	62.71
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	100	98.87	1.13
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100	99.50	0.50
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	100	99.50	0.50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	100	99.13	0.87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	%Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	100	99.88	0.12
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	100	98.87	1.13
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	100	98.87	1.13
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	100	98.87	1.13
Total		100	94.04	5,96

Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Pegawai	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	102,95%	68,18% (HKP)	34,77%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika	66,76%	53,85% (SANTIK)	12,91%
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses	Indeks SPBE terkait layanan	100%	56,41% (APTIKA + SANTIK)	43,59%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupa n Pegawai	Tingkat Efisiensi
	dan kapabilitas layanan SPBE	komunikasi dan informatika			
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	101,27%	51,85% (SEKRET)	49,42%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 34,77%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 10 orang ASN dan 5 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 22 orang. Untuk indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 12,91%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 5 orang ASN dan 2 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.
- Sasaran Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan indikator I Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 43,59%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai di bidang Aplikasi Informatika sebanyak 8 orang ASN dan 7 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 26 orang, dan pada Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 5 orang ASN dan 2 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 49,42%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang

Sekretariat, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 10 orang ASN dan 4 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 27 orang.

Semua Tugas Pokok dan Fungsi sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun dengan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih jauh dari ideal. Akan tetapi dengan adanya tenaga Non ASN dapat membantu berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya manusia yang ada.

Efisiensi Sarana dan Prasarana Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya keterbatasan anggaran yang ada maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak dapat seluruhnya terpenuhi, maka diperlukan skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Sehingga diharapkan dengan sarana dan prasarana seminimal mungkin tidak menghambat hasil kinerja yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya/sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Sarpras	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	102,95%	100%	2,95%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika	66,76%	100%	-33,24%
2	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	100%	100%	0,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Sarpras	Tingkat Efisiensi
	dan kapabilitas layanan SPBE				
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	101,27%	100%	1,27%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Gedung kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai sarana pelayanan IKM di Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi : (1)Pelayanan Penambahan Titik Jaringan; (2) Pelayanan Publikasi Informasi di Portal; (3) Pelayanan Penanganan Aduan Gangguan Layanan IT; (4) Pelayanan Penitipan Server (Co-Location); (5) Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang ada sarana efisiensi sarana dan prasarana sebesar 2,95%. Besaran efisensi yang kecil ini dikarenakan semua Pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2022 sudah terpenuhi dalam DPPA Tahun 2022. Adapun sarana dan prasarana penunjang sasaran ini terdiri dari AC split 2 unit, TV LED 50 inch 1 unit , papan informasi 1 buah, Lemari arsip filling cabinet 2 buah, lemari arsip geser kaca 4 buah, rak besi 2 buah, Lensa kamera 1 buah, tripod 1 buah, PC 1 unit, Laptop core i7 2 unit, printer 5 unit, TV QLED 55 inch 1 unit , hardisk server 1 buah, memory server 1 buah, PC core i5 3 unit, headphone 1 set dan HT 1 set.
- Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika dengan indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informatika yang menerapkan IPP pada kepuasan masyarakat tidak ada efisiensi sarana prasarana (-33,24%) dikarenakan pengadaan sarana prasarana sebagai penunjang IPP seperti desk pelayanan, sarpras ruang tunggu, toilet khusus Wanita dan pria, nomor antrian belum dianggarkan pada tahun 2022.
- Sasaran Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE terkait Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan

informatika tidak ada efisiensi sarana dan prasarana dikarenakan capaian kinerja dan capaian sarana dan prasarana sama-sama 100%. Adapun sarana dan prasarana penunjang sasaran ini terdiri dari Belanja Modal Software SQL Server dan Belanja Software – Windows Server.

- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP ada efisiensi sarana dan prasarana 1,27% besaran efisiensi ini dikarenakan semua Pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dokumen RKBMD tahun 2022 sudah terpenuhi dalam DPA Tahun 2022. Pengadaan dalam RKBMD tahun 2022 ditargetkan yaitu 30 unit dan terealisasi 30 unit, sehingga semua kebutuhan barang dapat direalisasikan dalam penganggaran Tahun 2022.

C. Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tabel 3.4
Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tahun 2022	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,1	2,96

Dengan Rincian Indikator Sebagai Berikut :

Hasil Evaluasi SPBE 2022

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Pemerintah Kab. Jombang	
K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 2.96
Predikat SPBE	: Baik

Nilai Indeks

3. Domain Kebijakan SPBE	: 2.90
Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2.90
4. Domain Tata Kelola SPBE	: 2.00
Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE	: 1.75
Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.00
Aspek 4 Penyelenggara SPBE	: 2.50
5. Domain Manajemen SPBE	: 1.55
Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE	: 1.63
Aspek 6 Audit TIK	: 1.33
6. Domain Layanan SPBE	: 4.02

Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.70
Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4.50

Penilaian atau Evaluasi SPBE tahun 2022 yang diadakan oleh Kemenpan RB, terdapat perubahan dan penambahan indikator yang dinilai dari evaluasi SPBE Tahun 2021, dimana pada evaluasi SPBE Tahun 2021 ada 35 indikator yang dinilai, sedang dalam tahun 2022, terbagi dalam 4 Domain, 8 aspek dan 47 indikator, artinya terdapat penambahan dan perubahan 12 indikator yang dinilai.

Dari hasil penilaian indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2022 terdapat beberapa indikator yang mendapatkan nilai 1 yaitu pada semua indikator audit, baik itu audit infrastruktur, audit aplikasi maupun audit keamanan. Hal ini masih bisa dimaklumi karena semua indikator audit ini adalah termasuk indikator baru yang masuk dalam penilaian SPBE di tahun 2022, karena baru masuk pada penilaian tahun 2022 sehingga belum pernah dilaksanakan audit TIK (audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan), sedang tahun 2021 tidak ada dalam penilaian SPBE tentang audit TIK. Perlu diketahui bahwa rata-rata indikator audit TIK kabupaten secara nasional adalah sebesar 1,11.

Disamping semua indikator audit dapat nilai 1, ada beberapa indikator manajemen yang dapat nilai 1, hal ini dikarenakan ada penambahan indikator manajemen dalam penilaian SPBE tahun 2022 yaitu sebanyak 4 indikator menjadi 8 indikator jika dibandingkan pada penilaian tahun 2021 sebanyak 4 indikator.

Karena ada banyak indikator baru sehingga tidak bisa langsung dapat nilai tinggi hal ini karena untuk menaikkan level tiap indikator butuh waktu untuk mengangkat nilai, mulai dari level 1 hingga level yang lebih tinggi. Untuk rata-rata indikator manajemen SPBE kabupaten secara nasional adalah sebesar 1,20.

D. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja selama tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja	
	a) Melakukan penyesuaian kembali atas ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dan target kinerja pada tujuan, sasaran strategis dan program kegiatan pada dokumen perencanaan tahun berikutnya,	Telah melaksanakan penyesuaian atas target dan indikator 18 indikator dengan target yang jelas perindikatornya

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	sehingga didapat keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya pada indikator tujuan “Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)” dengan target keluaran “18 indikator terkelola”, sehingga dapat diketahui kondisi kinerja yang akan dicapai pada setiap tahun perencanaan.	sehingga dapat dihitung kondisi kinerja setiap tahunnya
	b) Dalam menerapkan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) agar dibuat dengan perhitungan yang logis dan realistis berdasarkan basis data yang memadai serta dapat menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam setiap indikator	Telah melaksanakan perhitungan yang logis dan realistis IKU sehingga penilaian komponen perindikator dapat dijadikan fokus untuk kenaikan indikatornya
	c) Melakukan revisi atas hasil monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra yaitu tidak hanya monitoring pada program, kegiatan dan subkegiatan, melainkan juga pada capaian tujuan dan sasaran strategis serta memberikan Analisa beserta hambatan, upaya dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja	Telah dilakukan revisi atas hasil monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta memberikan Analisa beserta hambatan, upaya, rekomendasi sebagai dasar perbaikan kinerja
	d) Target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja selain dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan (reward) agar juga dapat dimanfaatkan untuk : - Memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja: - Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan	Perhitungan reward telah ditambahkan hasil penilaian “berkinerja dan kurang berkinerja) dan memberikan predikat yang jelas (baik, cukup, kurang)
2.	Pengukuran Kinerja	
	a) Hasil pengukuran kinerja yang telah dilengkapi dengan penjelasan atas	Hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar Strategi dan kebijakan pada

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	capaian kinerja, upaya dan/atau hambatan, data kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan bukti tindaklanjut sebagai upaya perbaikan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai kinerja (khususnya strategi dan kebijakan pada tujuan strategis “Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE”)	tujuan strategis “Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE
	b) Dalam pemberian reward and punishment atas penilaian kinerja pegawai agar dibuatkan standar/tingkatan yang jelas atas : - Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); - Pejabat/Pegawai dengan capaian diatas standar	Telah melaksanakan revisi dalam pemberian reward and punishment dengan menambahkan komponen penilaian Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) dan Pejabat/Pegawai dengan capaian diatas standar
3.	Pelaporan Kinerja	
	a) Pada dokumen laporan kinerja agar menambahkan informasi tentang efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai	Telah dilakukan revisi atas laporan kinerja dengan menambahkan efisiensi atas sumber daya manusia sumber daya kompeten dan sarana prasarana yang memadai
	b) Upaya dan/atau hambatan atas capaian kinerja yang telah dijelaskan dalam dokumen laporan kinerja agar tidak bersifat general/umum, seharusnya dapat dijelaskan secara spesifik pada setiap sasaran strategis dan sasaran program	Telah dilakukan revisi pada laporan kinerja dengan menambahkan upaya serta hambatan pada setiap sasaran strategis dan sasaran program
	c) Informasi dalam laporan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja	Laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja
4.	Evaluasi Kinerja	
	a) Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP untuk anggota tim	Telah mengusulkan BIMTEK evaluasi SAKIP pada BKD

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	b) Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Penggunaan teknologi aplikasi berdasarkan realisasi anggaran telah dilaksanakan pada aplikasi e-serapan sedangkan kinerja masih pada tahap penyusunan proses bisnis
	c) Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja	Telah melaksanakan evaluasi kinerja pertribulan dengan dasar hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja serta penetapan target kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2022. Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 sebagai berikut :

- **Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika** Capaian 102,95% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan (1) persyaratan, (2) sistem mekanisme dan prosedur; (3) waktu penyelesaian pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; (9) sarana dan prasara telah terlaksana dengan baik. Namun untuk kompetensi pelaksana dan sarpras perlu ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi.
- **Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja 2 yaitu Indeks Pelayanan Publik dibidang Komunikasi dan Informatika** capaian 66,76% dengan kategori kurang dikarenakan beberapa unsur kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan belum terpenuhi. Untuk itu pada tahun 2023 menindaklanjuti hasil rekomendasi.
- **Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE dengan Indikator Kinerja Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika** capaian 100% kategori baik (berhasil)
- **Sasaran strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP** capaian 101,27 kategori baik (berhasil), meskipun tercapai target namun perlu meningkatkan hasil kinerja sesuai rekomendasi.

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur** dengan kategori baik (berhasil), selanjutnya diharapkan dapat ditingkatkan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, penganggaran, layanan, dan evaluasi kegiatan;
- **Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator 1 Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** dengan kategori baik (berhasil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik khususnya pada Pejabat Pengolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PPID) dan Website ppid.jombangkab.go.id serta www.jombangkab.go.id. Melalui Informasi Publik, Menyediakan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Publik. Dari hasil kuisioner penilaian empat indikator yang dilakukan diatas mengenai Indeks Pengelolaan Informasi; **indikator 2 Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika** dengan kategori baik (berhasil); dikarenakan (1) persyaratan, (2) sistem mekanisme dan prosedur; (3) waktu penyelesaian pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; (9) sarana dan prasara telah terlaksana dengan baik. Namun untuk kompetensi pelaksana dan sarpras perlu ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi.
- **Program Aplikasi Informatika, dengan indikator 1 Indeks Kematangan Teknologi Infomasi Komunikasi** dengan kategori Istimewa (Sangat Berhasil), dengan indikator 2 Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator) dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan pengukuran kematangan TIK yang ada pada dinas kominfo khususnya pada sarpras TIK, SDM TIK, dan regulasi TIK terhadap akses layanan TIK terlaksana dengan baik.
- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator 1 Persentase data Sektoral yang dipublikasikan dengan kategori baik (berhasil)**, dikarenakan persentase Data sektoral yang dipublikasikan meliputi data dari 28 data sektoral yaitu pendidikan, kebudayaan kesehatan, sosial, PUPR, perumahan dan pemukiman, ESDM. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pangan, kelautan dan perikanan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, perhubungan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, pertanian, perdagangan Seluruh data sektoral yang dimaksud dipulikasikan dalam portal satudata.jombangkab.go.id dengan target 100%. **Indikator 2 Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika** dengan kategori kurang, dikarenakan beberapa unsur kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana

prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan belum terpenuhi. Untuk itu pada tahun 2023 menindaklanjuti hasil rekomendasi.

- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik** dengan kategori baik (berhasil) karena sistem elektronik resmi kabupaten Jombang menggunakan subdomain jombangkab.go.id dan menggunakan SSL sehingga dapat tercapai 100% karena telah memiliki pengamanan informasi yang bersertifikat.

B. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi diatas maka seluruh indikator dapat dikatakan baik (berhasil), namun sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika masuk kategori kurang. Untuk itu diperlukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan rekomendasi. Dari hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi IPP perlu adanya sejumlah perbaikan meliputi :

- Pembangunan Sarana Prasarana bagi pengguna layanan seperti ruang pelayanan, ruang tunggu dan toilet.
- Menetapkan 80% dari jumlah seluruh pelayanan yang ada di Kominfo
- Mengusulkan penambahan SDM sesuai kompetensi dan meningkatkan SPM bagi petugas layanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Nilai Evaluasi AKIP diperlukan upaya-upaya untuk :

- Seluruh dokumen diselaraskan dari Renstra, Renja, IKU, PK, SKP, Penetapan Target dan Renaksi sehingga selaras dari apa yang diperjanjikan dan ditargetkan
- Target yang telah direncanakan dalam dokumen penetapan kinerja harus benar- benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal;
- Membangun komitmen semua pimpinan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada, yaitu RPJMD ditingkat Kabupaten serta Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2018-2023;

Untuk meningkatkan Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika ditahun 2023 diperlukan penyesuaian arsitektur SPBE yang dikoordinasikan dengan seluruh OPD yang mengacu pada Perpres 132 Tahun 2022 terkait Arsitektur SPBE meliputi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur

SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jombang, 3 Januari 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**
IDA KHUMAIDA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19740727 199302 2 003